



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 /PMK.03/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN
TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Wajib Pajak adalah
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;
 - f. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional;
 - g. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional;
 - h. Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional;
 - i. Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;
 - j. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
 - k. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum;
 - l. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
 - m. pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
3. Surat Keterangan Tidak Dipungut, yang selanjutnya disingkat SKTD, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.
 4. Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan, yang selanjutnya disingkat RKIP, adalah daftar alat angkutan tertentu yang direncanakan untuk diimpor dan/atau diperoleh, yang digunakan untuk memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN.
 5. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan adalah laporan yang memuat informasi realisasi impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN.
 6. Surat Keterangan Tidak Dipungut Pengganti, yang selanjutnya disingkat SKTD Pengganti, adalah surat keterangan yang diterbitkan untuk mengganti SKTD dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SKTD.

7. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, yang menggunakan kapal untuk kegiatan memuat dan mengangkut, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan antara lain jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
10. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
11. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang

mengusahakan sarana perkeretaapian umum berupa kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel dan telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

13. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan, serta telah memiliki surat izin usaha dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;

- c. kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- d. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- e. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- f. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian, yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- g. komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1) kereta api;
 - 2) suku cadang kereta api;

- 3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau
- 4) prasarana perkeretaapian,
yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 3

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN meliputi:

- a. alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran, dan alat keselamatan manusia, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- c. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- d. suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara, yang

- diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional, yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan Pesawat Udara kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- e. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian; yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
 - f. komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan:
 - 1) kereta api;
 - 2) suku cadang kereta api;
 - 3) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan kereta api; dan/atau
 - 4) prasarana perkeretaapian,yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 4

Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean tidak dipungut PPN meliputi:

- a. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang meliputi:
 - 1) jasa persewaan kapal;
 - 2) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan

- 3) jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- b. jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - 1) jasa persewaan pesawat udara; dan
 - 2) jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara; dan
- c. jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Pasal 5

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu yang atas pemanfaatannya tidak dipungut PPN meliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

Pasal 6

- (1) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:
 - a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf g; atau
 - b. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f, diberikan dengan menggunakan SKTD.
- (2) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan.
- (3) Fasilitas tidak dipungut PPN atas:
 - a. impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - b. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau

- d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan menggunakan SKTD.
- (4) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan SKTD yang berlaku untuk periode:
 - a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun takwim dilakukan impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau
 - b. sejak tanggal penerbitan SKTD sampai dengan 31 Desember tahun penerbitan SKTD, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan dalam tahun takwim dimaksud.
 - (5) SKTD untuk pemberian fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilampiri dengan RKIP.
 - (6) Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukan pemanfaatan atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak diberikan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak maupun cabangnya terdaftar, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon SKTD merupakan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional; dan
 - d. telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemohon SKTD merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III

TATA CARA

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf m mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. jenis usaha;
 - c. nama dan/atau jenis barang;
 - d. kuantitas barang;
 - e. Nilai Impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam hal penyerahan;
 - f. PPN yang terutang;
 - g. informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan/atau dokumen pembayaran;
 - h. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m;
 - i. nomor kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d;
 - j. nomor dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan
 - k. identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan dalam hal permohonan SKTD diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 8 ayat (2); atau

- b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dan/atau Pasal 8 ayat (2),

secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.

- (4) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wajib Pajak harus menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. fotokopi dokumen :

- 1) *invoice*;
- 2) *Bill of Lading, Air Way Bill*, atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
- 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
- 4) pembayaran atau dokumen pengakuan utang dalam hal melakukan impor alat angkutan tertentu;

- b. fotokopi dokumen:

- 1) pemesanan barang;
- 2) *proforma invoice*; dan/atau
- 3) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan,

dalam hal menerima penyerahan alat angkutan tertentu;

- c. fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal impor dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d;

- d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf m; dan/atau
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak, menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD.
- (6) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap sah apabila ditandatangani oleh:
- a. pejabat yang berwenang dengan jabatan minimal setingkat administrator, untuk permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - b. pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk permohonan SKTD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf d dan huruf m.
- (8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pelayanan Pajak:
- a. menerbitkan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 8 ayat (7); atau



- b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), dan/atau Pasal 8 ayat (7),
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
- (9) SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (8) huruf a diterbitkan atas sebagian atau seluruh alat angkutan tertentu sebagaimana yang dimohonkan, yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.
- (10) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan alat angkutan tertentu, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut.
- (11) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e sampai dengan huruf l, mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, permohonan SKTD dilampiri dengan RKIP.
- (3) Permohonan SKTD yang disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat informasi:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. jenis usaha;

- c. nomor izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, izin usaha angkutan udara, izin usaha penyelenggaraan sarana dan/atau izin usaha prasarana perkeretaapian umum;
 - d. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j;
 - e. nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal pemohon adalah Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j;
 - f. jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan SKTD;
 - g. periode yang diajukan permohonan SKTD; dan
 - h. identitas pengurus yang mengajukan permohonan SKTD.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3); atau
 - b. tidak memproses permohonan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 9 ayat (3), secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.
- (5) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Wajib Pajak harus menyampaikan dokumen pendukung secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan menunjukkan asli dokumen, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. fotokopi surat perizinan berusaha yaitu izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
 - b. fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutan udara, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf i;
 - c. fotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan/atau prasarana perkeretaapian umum, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf k dan huruf l;
 - d. fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor dilakukan dan/atau penyerahan diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf j; dan
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD.
- (7) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Permohonan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap sah apabila ditandatangani oleh pengurus atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar:
 - a. menerbitkan SKTD, dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (8); atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (8), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKTD diterima lengkap.
- (10) Dalam hal permohonan SKTD diajukan atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (9) huruf a diterbitkan dengan dilampiri RKIP atas seluruh atau sebagian alat angkutan tertentu yang terdapat dalam RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.
- (11) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan SKTD atas penyerahan dan/atau pemanfaatan, SKTD diterbitkan atas bagian PPN yang belum dipungut.
- (12) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7).

A 14

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan dokumen pendukung melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), dalam hal terjadi keadaan kahar antara lain peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Kewajiban penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penetapan keadaan kahar atau penetapan keadaan tanggap darurat.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP, dalam hal terdapat:
 - a. perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis alat angkutan tertentu;
 - b. penambahan atau pengurangan jumlah alat angkutan tertentu;
 - c. perubahan, penambahan, atau pengurangan pelabuhan, dalam hal impor; dan/atau
 - d. perubahan, penambahan, atau pengurangan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, dalam hal penyerahan.
- (3) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau

- b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), secara otomatis melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak, segera setelah permohonan disampaikan.
- (4) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan RKIP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan perubahan RKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan:
- a. RKIP perubahan, dalam hal permohonan memenuhi seluruh atau sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); atau
- b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (6) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau menerima penyerahan.
- (7) RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a:
- a. merupakan pengganti atas RKIP sebelumnya dan menjadi lampiran dari SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10); dan
- b. memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.

- (8) Penerbitan RKIP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan tanpa mengubah SKTD yang masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah diterbitkan SKTD yang dilampiri RKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), harus menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk periode sesuai dengan masa berlakunya SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun takwim berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan tetap harus disampaikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerbitan SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKTD Pengganti.
- (2) Penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

- (3) Kesalahan penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a; dan
 - b. kesalahan tulis pada SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a.
- (4) Permohonan penggantian SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara tertulis, dengan disertai alasan penggantian dan harus dilampiri SKTD yang telah diterbitkan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan memberikan keputusan berupa penerbitan:
 - a. SKTD Pengganti, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. surat penolakan dengan menyebutkan alasan, dalam hal permohonan tidak disetujui,paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (6) SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal mulai berlakunya SKTD yang dilakukan penggantian.
- (7) Atas penerbitan SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan SKTD.
- (8) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan namun tidak lengkap dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
- (2) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN yang terdapat dalam SKTD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.
- (3) Atas pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang.
- (4) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti

Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 15

- (1) PPN terutang atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang telah mendapat fasilitas tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib dibayar, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
 - b. dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar kembali PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:
 - a. alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang; atau
 - b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h melakukan pemindahtanganan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, dan/atau kapal tongkang untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar, yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai

dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

- (4) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; atau
 - b. Wajib Pajak yang menerima penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (5) Pembayaran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
- (6) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPN yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat dikreditkan.
- (8) Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam keadaan kahar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu, menerima penyerahan alat angkutan tertentu, melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan/atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan

- tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN sebelum memiliki SKTD;
- b. Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, melebihi jumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam SKTD untuk setiap impor atau penyerahan atau jumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP perubahan; atau
 - c. Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, yang tidak termasuk dalam jenis alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN atas impor atau perolehannya.
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak berupa Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) PPN yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 17

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan:

- a. Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (2); dan/atau

- b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN pada dokumen pemberitahuan pabean di bidang impor.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:
 - a. penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 50 TAHUN 2019".
- (4) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan bahwa alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diserahkan terdapat dalam SKTD yang dimiliki oleh pihak yang menerima penyerahan.
- (5) Pengusaha yang telah mendapatkan SKTD dan melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut.

Pasal 19

- (1) Alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f, serta Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dokumen berupa contoh format:
 - a. permohonan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), tercantum dalam Lampiran huruf B,
 - b. permohonan SKTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), tercantum dalam Lampiran huruf C,
 - c. RKIP yang dilampirkan pada permohonan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf D,
 - d. SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (8) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD untuk setiap impor atau penyerahan, tercantum dalam Lampiran huruf E,
 - e. SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 ayat (9) huruf a, serta tata cara penatausahaan SKTD, tercantum dalam Lampiran huruf F,
 - f. RKIP yang menjadi lampiran SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10), tercantum dalam Lampiran huruf G,
 - g. SKTD Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf H,
 - h. surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf b, Pasal 9 ayat (9) huruf b, Pasal 11 ayat (5) huruf b, dan Pasal 13 ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf I,

- i. RKIP perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran huruf J,
- j. Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf K,
- k. Surat Pembatalan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran huruf L,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), dan Pasal 16 ayat (3), tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan SKTD yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015.

Pasal 21

- (1) SKTD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKTD tersebut.
- (2) Terhadap SKTD yang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, ketentuan terkait penggantian atau

pembatalan SKTD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.03/2015.
- (2) Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan RKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Wajib Pajak yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, menyampaikan laporan RKIP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dianggap sudah mengajukan permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan kepada Pihak Lain Baik Sebagian atau Seluruhnya serta Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1537); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP 19730115 199803 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 /PMK.03/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT
ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. ALAT ANGKUTAN TERTENTU

I. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional

a. Kapal Angkutan Laut, Kapal Angkutan Sungai, Kapal Angkutan Danau dan Kapal Angkutan Penyeberangan, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pandu, Kapal Tunda, dan Kapal Tongkang:

| NO. | NAMA BARANG |
|-----|--|
| 1. | Kapal Angkutan Laut |
| 2. | Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| 3. | Kapal Penangkap Ikan, termasuk kapal untuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan |
| 4. | Kapal Pandu |
| 5. | Kapal Tunda |
| 6. | Kapal Tongkang |

b. Alat angkutan di bawah air, yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Suku Cadang, Alat Perlengkapan Kapal, Alat Keselamatan Pelayaran, dan Alat Keselamatan Manusia:

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----------|----------------------------------|---|
| I. | HULL PART | |
| 1 | Hull Equipment | - Hatch and Manhole - Mast - Post Rigging - Anchoring and Mooring - Life Saving Equipment and Boat Davit - Awning and Canvas Work - Ladder and Stair Way - Rail - Stanchion and Davit - Skylight and Removable Plate - Gate Hole - Ramp Door |
| 2 | Deck Machinery | - Parts for Windlass - Mooring Winch - Capstan - Boat Winch - Steering Gear - Lift - Handling Hoist - Handling Crane - Derrick - Bow Thruster - Hydraulic Pump Unit - Refrigerating Plant |
| 3 | Accommodation | - Bulkhead - Lining and Cellings - Deck Covering - Insulation Door - Side Scuttle and Window - Sanitary Equipment - Commissary Equipment |
| 4 | Painting and Cathodic Protection | - Marine Paints - Cathodic Protection - Marine Growth Prevention System - Impress Current Cathodic Protection |
| 5 | Ventilation and Air Conditioning | - Shift Air Conditioning System - Mechanical Ventilation - Natural Ventilation |
| 6 | Hull Piping System | - Water Ballast System - Ballast Control System - Fuel Oil Filling and Transfer Line - Deck Wash System |

14

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|------------|----------------------------|---|
| | | - Bilge and Scupper |
| | | - Water Service System |
| | | - Steam and Exhaust Piping System |
| | | - Fire Fighting System |
| | | - Compressed Air System |
| | | - Voice Tube |
| 7 | Navigation Equipment | - Navigation Equipment |
| | | - Communication Equipment |
| | | - Flag and Book |
| | | - Distress Signal |
| | | - Navigation Light |
| | | - Magnetic Compass |
| | | - Gyro Compass |
| | | - Steering Control |
| | | - Doppler Sonar |
| | | - Echo Sounder |
| | | - Radar System |
| | | - Radio Direction Finder |
| | | - Decca Navigator |
| | | - Loran C Receiver |
| | | - Central Clock System |
| | | - Horn Control System |
| | | - Window Wiper |
| | | - Anemometer and Anemoscope |
| | | - Loading Computer |
| II. | MACHINERY PART | |
| 8 | Main Propulsion Unit | - Parts and Equipment for Main Eropulsion Diesel |
| | | - Main Propulsion Steam/Gas Turbine |
| 9 | Shafting and Propeller | - Shafting |
| | | - Breaking |
| | | - Stern Tube |
| | | - Propeller and Its Accessories |
| | | - Clutch and Gearbox |
| 10 | Steam and Generating Plant | - Parts and Equipment for Steam Generating Plant |
| | | - Fitting and Accessories |
| | | - Uptake and Funnel |
| | | - Burner Control |
| 11 | Electric Generating Plant | - Parts and Equipment for Main Generator Engine/Turbine |
| | | - Auxiliary Generator Engine/Turbine |
| | | - Emergency Generator Engine |
| 12 | Condensing Equipment | - Part for Main Condenser |
| | | - Auxilary Condenser |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-----------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Main Condenser Vacuum Pump - Gland Exhaust Fan and Gland Steam Condenser |
| 13 | Pumps | <ul style="list-style-type: none"> - Parts and Equipment for Main Feed Water Pump - Centrifugal Pump - Axial Pump - Rotary Pump - Reciprocating Pump |
| 14 | Air Compressor, Reservoir and Fan | <ul style="list-style-type: none"> - Parts and Equipment for Main/ Auxiliary Starting Air Compressor - Control and Ship Service Air Compressor - Emergency Starting Air Compressor - Air Reservoir - Force Draft Fan - Gland Exhaust Fan - Boiler Hood Exhaust Fan - Control Air Dryer |
| 15 | Heat Exchanger | <ul style="list-style-type: none"> - Parts and Equipment for Feed Water Heater - Lubricating Oil Cooler - Drain Cooler - Fuel Oil Heater - Fresh Water Cooler - Distilling Plant - And Other Heat Exchanger of Machinery's Accessory |
| 16 | Machinery Piping System | <ul style="list-style-type: none"> - Main Auxiliary Steam System - Drain and Condensate System - Feed Water System - Fuel Oil Filling - Transfer and Service System - Lubricating Oil System - Sea Water Service System - Starting Control and Service Air System - Bilge Water System |
| 17 | Valve | <ul style="list-style-type: none"> - Valve for Sea Water System - Feed Water - Fuel Oil - Lubricating Oil - Condensate - Fresh Water and Air - Pressure Safety Valve - Pressure Vacuum/ Relief Valve |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-------------|--|---|
| 18 | Automatic Remote Control and Instrumentation | <ul style="list-style-type: none"> - Navigation Control - Engine Monitoring System - Cargo Monitoring System - Steam Plant Monitoring System - Miscellaneous Devices - Fire and Gas Detector - Fire Fighting Apparatus - Related Instrumentation and Control |
| 19 | Others: | <ul style="list-style-type: none"> - Engine Handling Hoist - Environment Protection Equipment - Heating Coil - Purifier |
| III. | ELECTRIC PART | |
| 20 | Lighting equipment | <ul style="list-style-type: none"> - Electric Ship Light - Emergency Light - Portable Lamp - Switch - Receptacle and Combination Outlet Box |
| 21 | Interior Communication Equipment | <ul style="list-style-type: none"> - Parts for Common Battery - Automatic Exchange Telephone System - Loudspeaking System - General Alarm - Fire Alarm - Halon/CO2 Alarm - Transceiver System - Engine Order Telegraph - Shaft Revolution and Rudder Angle Indicator |
| 22 | Radio Equipment | <ul style="list-style-type: none"> - Radio Telegraph and Telephone - Lifeboat Portable Radio Equipment - Radio Beacon - Vhr Radio Telephone - Satellite Communication System - Weather Facsimile - Antenna Multicoupler - Ships Telephone - Broadcasting Radio Receiver - Television Receiver and Antenna - Stereophonic Tape Player |
| 23 | Electric Cable and Tools | <ul style="list-style-type: none"> - Electric Cable and Its Related Accessories - Switchboard - Battery Charging System - Electric Motor and Motor Control |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Group Starter Panel - Main Emergency Switchboard |
| IV. | CARGO PART | |
| 24 | Cargo handling machinery | <ul style="list-style-type: none"> - Parts for Cargo Handling Machinery, Such as: - Cargo Hose - Cargo Pump - Cargo Heater - - Cargo Measuring Equipment - Inert Gas Generator Plant - Tank Cleaning Equipment - Butter Worth Heater - Self Unloading |
| 25 | Cargo Control and Instrumentation | <ul style="list-style-type: none"> - Cargo Control System - Pressure and Temperature Measurement |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Cargo Tank Liquid Level Indicator and Alarm System - Portable Cargo Measurement System |
| V. | SISTEM PERSENJATAAN | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
| V. | ALAT PENANGKAPAN IKAN | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Alat penangkapan ikan yang melekat pada kapal penangkap ikan | |

II. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan Kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Usaha Angkutan Niaga Nasional

a. Pesawat Udara:

| NO. | NAMA BARANG |
|-----|---------------|
| 1. | Pesawat Udara |

b. Suku Cadang, Alat Keselamatan Penerbangan dan Alat Keselamatan Manusia, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan:

| NO. | KELOMPOK | ARTICLE |
|-----|--|---|
| 1. | Suku Cadang Rangka Pesawat: Komponen pesawat udara dan perlengkapan kursi, <i>brake unit, wheel assy, landing gear</i> , dll | <i>Airframe Parts, Aircraft component, and related accessories composite</i> |
| 2 | Ban luar dan dalam pesawat udara (baru dan vulkanisir) | <i>Aircraft New Tires, Retreated Tires and Tubes, Pneumatic of Rubber</i> |
| 3 | Mesin torak pesawat udara dan suku cadangnya | <i>Aircraft and Gasoline, Reciprocating Engine and Related Parts</i> |
| 4 | Mesin turbin pesawat udara dan suku cadangnya, baling-baling | <i>Aircraft gas turbine, jet engine, and related parts, propeller</i> |
| 5 | Mesin roket pendorong pesawat udara dan suku cadangnya | <i>Rocket Engine and Related Parts</i> |
| 6 | Mesin bantu pesawat udara dan suku cadangnya | <i>Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) and related parts</i> |
| 7 | Perlengkapan mesin terbang untuk jenis mesin torak, jenis mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket dan mesin bantu | <i>Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit (APU)</i> |
| 8 | Bantalan-bantalan anti gesekan tanpa penopang | <i>Bearing Anti Friction Unmounted</i> |
| 9 | Bantalan-bantalan luncur tanpa penopang | <i>Bearing Plain Unmounted</i> |
| 10 | Bantalan-bantalan dengan penopang | <i>Bearing Unmounted</i> |

| NO. | KELOMPOK | ARTICLE |
|------------|--|---|
| 11 | Alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara | <i>Refrigerator and Air Conditioning, Heating and Pressuizing Equipment for Aircraft</i> |
| 12 | Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angina untuk pesawat udara | <i>Fans, Air Circular and Blower Equipment for Aircraft</i> |
| 13 | Alat pemadam kebakaran pesawat udara dan perlengkapannya | <i>Fire Fighting and Equipment and Related Accessories</i> |
| 14 | Peralatan kewanaman dan keselamatan untuk pesawat udara beserta perlengkapannya | <i>Safety and Rescue Equipment and Related Accessories</i> |
| 15 | Peralatan untuk sistem instalasi pipa dan perlengkapannya, rak serbet dispenser dan katup pembersih bowl | <i>Plumbing Fictures and Accessories Dispenser Towel Rack, Flush Valve, Sink</i> |
| 16 | Peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat udara | <i>Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft</i> |
| 17 | Pipa dan selang untuk pesawat udara | <i>Pipe and Tube for Aircraft House and Tubing for Aircraft</i> |
| 18 | Macam-macam sambungan pipa selang yang terbuat dari karet dan metal untuk pesawat udara | <i>Miscellaneous Fitting for House, Pipe and Tube for Aircraft</i> |
| 19 | Sekrup | <i>Screws</i> |
| 20 | Baut | <i>Bolds</i> |
| 21 | Baut Tanam | <i>Studs</i> |
| 22 | Mur dan Ring | <i>Nuts and Washer</i> |
| 23 | Kunci Paku dan Pasak | <i>Nails, Keys and Ping</i> |
| 24 | Paku Keling | <i>Rivets</i> |
| 25 | Alat-alat pengencang | <i>Fastening Devices</i> |
| 26 | Material untuk Packing dan Gasket | <i>Packing and Gasket Material</i> |
| 27 | Bermacam-macam pegas | <i>Cod, Flat, and Wire Spring</i> |
| 28 | Ring, Shim and Spacer | <i>Rings, Shims and Spacer</i> |
| 29 | Peralatan Komunikasi Radio dan Televisi, termasuk sistem <i>video entertainment</i> untuk pesawat udara | <i>Radio and Television Communication including Video Entertainment System</i> |
| 30 | Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat udara | <i>Radio and Navigation Equipment for Aircraft</i> |
| 31 | Peralatan komunikasi di dalam pesawat udara | <i>Handset, Intercommunication and publik address system such as Microphone and Speakers for Aircraft</i> |

| NO. | KELOMPOK | ARTICLE |
|------------|--|--|
| 32 | Peralatan radar untuk Pesawat Terbang | <i>Radar Equipment for Aircraft</i> |
| 33 | Modul-modul elektronik | <i>Electronic Modules</i> |
| 34 | Antenna, Tabung Penghantar Gelombang beserta peralatannya | <i>Antennas Wave Guide and Related Equipment</i> |
| 35 | Konduktor Serat Optik | <i>Fibre Optic Conductors</i> |
| 36 | Kabel Serat Optik | <i>Fibre Optic Cables</i> |
| 37 | Rakitan Kabel Serat Optik | <i>Fibre Optic Cables Assemblies and Harnesses</i> |
| 38 | Peralatan Serat Optik | <i>Fibre Optic Devices</i> |
| 39 | Sambungan Serat Optik | <i>Fibre Optic Interconnect</i> |
| 40 | Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangannya | <i>Fibre Optic Accessories and Supplies</i> |
| 41 | Perangkat Serat Optik | <i>Fibre Optic Kits and Sets</i> |
| 42 | Motor Listrik | <i>Motors Electrical</i> |
| 43 | Generator, Starter Generator dan suku cadangnya untuk pesawat udara | <i>Generators and Starter Generator, Electrical Parts for Aircraft</i> |
| 44 | Fuel Cell Power Unit beserta komponen dan perlengkapannya | <i>Fuel Cell Power Unit Component an Accessories</i> |
| 45 | Alat Pengubah Arus Listrik, berputar maupun yang tidak berputar | <i>Electrical Converters, Rotating and Non-Rotating</i> |
| 46 | Baterai Pesawat Udara yang dapat diisi kembali | <i>Batteries, Rechargeable</i> |
| 47 | Lampu-lampu Pesawat Udara, Ballast, Pegangan Lampu, Starter dan perlengkapannya | <i>Electrical Vehicular, Light and Fibers, Electrical Portables, Hand Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamp Holder, Starters and its related Accessories</i> |
| 48 | Alarm Pesawat dan Sistem Signal | <i>Aircraft Alarm and Signal System</i> |
| 49 | Instrument navigasi di Kokpit | <i>Cockpit Navigational Instrument</i> |
| 50 | Instrument Pesawat Udara | <i>Flight Instrument</i> |
| 51 | Peralatan Pengontrol Otomatis seperti Komputer Pengendali Pesawat dan Suku Cadangannya | <i>Automatic Pilot Machine such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts</i> |
| 52 | Instrumen mesin | <i>Engineer Instrument</i> |
| 53 | Alat Ukur Instrumen Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis | <i>Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion and Measuring Instrument</i> |
| 54 | Instrumen Pengukur dan Pengendali Tekanan, Suhu, dan Kelembapan | <i>Pressure, Temperature, Humidity, Measuring and Controlling Instrument</i> |

| NO. | KELOMPOK | ARTICLE |
|------------|--|--|
| 55 | Perlengkapan Kabin, Kursi, Sarung Kursi, Lapos Dinding untuk Pesawat Udara | <i>Household furnishing, Seat Cover, Wallpaper for Aircraft</i> |
| 56 | Tiray, Krey dan Gardin pada Pesawat Udara | <i>Draperies Awnings and Shades for Aircraft</i> |
| 57 | Peralatan Dapur Pesawat Udara (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain-lain) beserta perlengkapan pelayanannya | <i>Food Cooking, Baking and Serving Equipment (Oven, Coffee Maker, Refrigerator, etc) for Aircraft</i> |
| 58 | Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya | <i>Specialized Shipping, Stroge Container, Cargo Tie Down and Equipment</i> |
| 59 | Bermacam-macam bahan Pabrikan bukan Metal untuk Suku Cadang | <i>Miscellaneous, fabricated, Non-Metallic Materials</i> |
| 60 | Batang dan Batang Kecil dan Besar dari Baja | <i>Bars and Rods, Iron and Steel alumunium</i> |
| 61 | Papan-papan Identifikasi dan Tanda-tanda | <i>Sign, Identifications, Plates</i> |
| 62 | Alat-alat Ukur Presisi untuk Pesawat Udara | <i>Precision and Measuring Tools for Aircraft</i> |
| 63 | Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Penerbangan, Teknisi dan Awak cabin, beserta Suku Cadangannya | <i>Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts</i> |
| 64 | Peralatan untuk Perawatan dan Perbaikan Khusus Pesawat Udara | <i>Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialize Equipment</i> |
| 65 | Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang | <i>Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments</i> |
| 66 | Motor Pembilas | <i>Flush Motor</i> |
| 67 | Pernis, Cat, Senyawa Perekat, Perekat dan Produk terkait | <i>Varnishes, Paints, Sealing Compound, Adhesives and Related Products</i> |
| 68 | Oli, Gemuk, Pelumas dan Hidraulik | <i>Oil, Greases, Lubricating and Hydraulic</i> |
| 69 | Sabung, Agen Pembersih dan Produk Terkait | <i>Soap, Cleaning Agent and Related product</i> |

| NO. | KELOMPOK | ARTICLE |
|------------|--|---|
| 70 | Buku, Regulasi, Instruksi Manual, Peta Aeronautika dan Publikasi lain yang mendukung | <i>Book, Regulation, Instruction manuals, Aeronautical Maps and Other publication</i> |
| 71 | Software Perawatan dan Perbaikan khusus untuk Pesawat Udara | <i>Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialize Software</i> |
| 72 | Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada pesawat udara yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia | |

III. Rincian Alat Angkutan Tertentu yang Diimpor dan Digunakan oleh atau Diserahkan kepada dan Digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

a. Kereta Api:

| NO. | NAMA BARANG |
|-----|-------------|
| 1. | Kereta Api |

b. Suku Cadang, Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan, serta Prasarana Perkeretaapian:

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---|---|
| I. | Sarana Kereta Api | |
| A. | Lokomotif | 1. Lokomotif Diesel Electric DC/DC 2. Lokomotif Diesel Electric AC/DC 3. Lokomotif Diesel Electric AC/AC 4. Lokomotif Listrik 5. Lokomotif Diesel Hidrolik/ DH |
| A1 | Komponen/ Suku Cadang Mesin Lokomotif | 1. Sub Kelompok Mekanisme Engine - Main Frame Assembly - Main Frame Equipment List Balance Shafts, Idler Shafts & Gears Camshaft, Crossheads, Gear & Bearings Sectional Cover, Crankcase Inspection Opening Cover, Generator End Main Frame Crankshaft & Main Bearings Switch, Pressure Timing Plate - Fuel Linkage and Governor Drive Drive, Governor Fuel Control Linkage Lever, Fuel Linkage Governor, Over speed Over speed Extension Link Over speed Trip Device - Engine Control Governor Equipment List Engine Control Governor Electric |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | Engine Control Governor Mekanik |
| | | Governor Mounting & Linkage, Engine Control |
| | | Engine Control Module (ECM) |
| | | - Fuel Oil, Lube Oil Piping Equipment List |
| | | Fuel Oil, Lube Oil, Water Piping & Fuel Filter |
| | | Pressure Bias Governor Air Line Kit |
| | | Pump & Motor, Fuel Booster |
| | | - Power Plant Mounting Equipment List |
| | | Alternator-Generator Alignment & |
| | | Power Plant Mounting |
| | | - Forward End Cover Equipment List |
| | | Forward End Cover with Lube Oil Pump Drive |
| | | Water Pump Drive, Crankcase Breather Vibration Damper |
| | | Pump & Connection Water |
| | | Pump, Gear & Mounting, Lube Oil |
| | | Valve Lube Oil Relief |
| | | - Power Assembly Equipment List |
| | | Connecting Rod |
| | | Cylinders, Push Rods & |
| | | Rocker Assemblies with Fuel Pump Mounting |
| | | Nozzle, Fuel Injection |
| | | Piston & Rings |
| | | Pump, Fuel Injection |
| | | - Turbocharger And Intercooler |
| | | - Exhaust Stack & Installation |
| | | - Inlet & Discharge Water Header |
| | | Intercooler & Air Intake Manifold |
| | | Turbocharger |
| | | Rotor |
| | | Turbocharger Installation |
| | | Water & Lube Oil Piping |
| | | - Manifold Equipment List |
| | | Manifold, Exhaust |
| | | - Turbocharger Assembly |
| | | - Intercooler Assembly |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | - Crank Case Assembly |
| | | - Gear Case Assembly |
| | | - Cover Front End |
| | | - Cover Crank Case Inspection |
| | | - Dipstick Assembly |
| | | - Mental Mesh/Oil Charge/ Main Bearing |
| | | - Chamshaft Gear Drive |
| | | - Chamshaft Assembly |
| | | - Bearing Pin |
| | | - Crank Shaft Assembly |
| | | - Timing Gear |
| | | - Balance Shaft/ Idler Shaft & Gears |
| | | - Cylinder Liner Assembly |
| | | - Connecting Ro Assembly |
| | | - Piston Assembly |
| | | - Cover Wilo |
| | | - Hub |
| | | - Jacking Ring |
| | | - Pump/ Gear & Mounting |
| | | - Lube Oil Filter |
| | | - Breather |
| | | - Cylinder Head |
| | | - Prechamber |
| | | - Rocker Support |
| | | - Valve |
| | | - Governor Assy |
| | | - Over Speed Governor |
| | | - V-Belt |
| | | - Ring |
| | | - Seal |
| | | - Screen |
| | | - Sleeve |
| | | - Dca Liquid |
| | | - Gasket |
| | | - Test Kit |
| | | - Stinger |
| | | - Collar |
| | | - Hose |
| | | 2. Air Intake System: |
| | | - Air Inlet |
| | | - Air Cleaner |
| | | - Air Filter |
| | | - Turbo Siper Charger |
| | | - Air Piping & Fitting |
| | | - Air Intake Manifold |
| | | - Exhaust Manifold |
| | | - Stack |
| | | 3. Cooling System |
| | | - Cooler Drive with Cooling Plat |

F A

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Voith Cooling Unit - Cooler Joint - Variable Speed Fan with Impeller - Water Tank - Water Inlet Header - Discharge Header - Piping - Radiator - Fan Drive - Cooler & Mounting - Water Pump - Air Cooler - Shutter - Regulating - Valve Assy - Water Treatment - Bevel Gear Assy - Temperature Control for Cooling Water <p>4. Fuel System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuel Tank Arrangement - Fuel Tank - Fuel Strainer - Fuel Injection Pump - Fuel Nozzle Assy - Fuel Piping & Fitting - Fuel Pump with DC Motor - Fuel Pump with AC Motor - Fuel Filter Assy - Pre-Fuel Tank <p>5. Lube Oil System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lube Oil Assy - Lube Oil Filter/ Element - Lube Oil Cooler - Lube Oil Pipe System - Preliminary Lubrication Pump Assy - Oil Pump - Relay Valve - Oil Pressure Switch - Low Oil Switch |
| A2 | Sistem Kontrol Lokomotif | <p>1. CDC/PDC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miscellaneous Control Equipment Bus Bar-Cable-Cleat Arrangement Contractors Interlock |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | Magnet Valve |
| | | Reverser |
| | | Switch |
| | | - Control Group Equipment List |
| | | Control Group |
| | | Compartment with Doors & Covers |
| | | Panel |
| | | Relay |
| | | Terminal Board |
| | | Voltage Regulator |
| | | Cards |
| | | - Resistor Dynamic Brake |
| | | - Thyrtor Regulator Assy |
| | | - Relay Contactor |
| | | - Interlock |
| | | - Magnet Switch Reverser |
| | | - Control Group |
| | | - Compartement with Doors and Cover |
| | | - Panel |
| | | - Terminal Board |
| | | - Voltage Regulator |
| | | - Circuit Breaker |
| | | - Dead Man Pedal System |
| | | - Motor Start |
| | | - Pressure Switch |
| | | - Throttle Valve |
| | | - Pantograph |
| | | - GTO Inverter |
| | | 2. AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit - Additional |
| | | - Adapter |
| | | - Base Asm |
| | | - Bolt |
| | | - Bracket |
| | | - Brk/ Switch Asm |
| | | - Bushing |
| | | - C Filter |
| | | - Cable |
| | | - Card Modules |
| | | - Cb Cover |
| | | - Circ Brkr |
| | | - Circuit Breaker |
| | | - Clamp |
| | | - Compressor Arr Panel |
| | | - Conn |
| | | - Connector |
| | | - Const Diag |
| | | - Const Dia |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--------------------------------|
| | | - Constr Diag |
| | | - Cont Supt |
| | | - Cont/ Intl Cm |
| | | - Cont/ Intlk |
| | | - Control Modules |
| | | - Cover |
| | | - Cover Circ Brkr |
| | | - Cplg St Coup |
| | | - Decal Brightstar Sir |
| | | - Decal Load |
| | | - DID Panel |
| | | - Disel Engine |
| | | - Diode |
| | | - Diode Asm |
| | | - Display Modules |
| | | - Door Latch Toggle |
| | | - Element |
| | | - Equipment List Gta 11 |
| | | - Exhauster Blwr Motor |
| | | - Flex Air Duct |
| | | - Ftg Cnd Strain Rel |
| | | - Ground Block |
| | | - Holder |
| | | - Hose |
| | | - Ind Plate |
| | | - Interlock Control |
| | | - Kit, Retrofor Single |
| | | - Kit, Connector At Kit |
| | | - Kit, Connector Cps Conn Kit |
| | | - Kit, Connector D7up Conn Kit |
| | | - Kit, Connector Db25 Kit |
| | | - Kit, Connector Jumper Kit |
| | | - Kit, Connector Lot/Ewt Kit |
| | | - Kit, Connector Scm Kit |
| | | - Kit, Retrofit |
| | | - Kit, Retrofit Bkt Gp32 |
| | | - Kit, Retrofit Cont |
| | | - Kit, Retrofit Rev Dp32 |
| | | - Knife Swith Spdt-Pb |
| | | - Lamp Eng Rm |
| | | - Lamp Socket |
| | | - Latch |
| | | - Lens |
| | | - Light Asm Misc |
| | | - Loadmeter |
| | | - Lockwasher |
| | | - Module |
| | | - Module Circuit |
| | | - Nut |
| | | - Panel |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Panel Asm - Press Sw - Rectifier Power Block - Reference Item Kit Miscel - Relay - Resis Pnl - Resistor - Reverser - Rotary Switch - Schematic Electrical - Screw - Sensor - Shunt - Sonalert Sona - Support Asm - Switch - Switch Dpdt Vco - Switch Pressure - Switch Spdt-Pb - Switch Spdt-Red-Pb - Temp Probe - Terminal - Thyrite - Traction Inverter - Transd Asm - Vacuum Switch Efvs - Washer Narrow - Wire- Shield 2 + Drain - Wire, Lock - Wire-Cable - AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories |
| A3 | Sistem Transmisi Listrik: Lokomotif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Traction, Exciter, Aux, Generator: <ul style="list-style-type: none"> - Field Coils - Armature - Gear Case - Brush Holder & Carbon Brush - Bearing - Auxiliaries - Traction Generator and Auxiliary Power - Auxiliary Generator - Exciter - Gear Unit - Power Take-Off - Traction Generator - Rectifier 2. Traction Motor: <ul style="list-style-type: none"> - Housing |

91

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Field Coils - Armatur - Gear Box - Brush Holder & Carbon Brush - Bearing - Duct TM - Motor Suspension - Accessories TM - Strating Motor Assy - Armatur Shaft Pinion & Draft Gear - Rewinding Kit - Traction Motor Assy |
| A4 | Sistem Transmisi Hidrolik: Lokomotif | <p>1. Turbo Transmission:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Housing Assy - Filter Pump - Main Control - Output Drive - Reversing Valve - Step Up Gear - Gear Wheels - Cover - Rotor Uniform Part - Input & Output Drive Part - Intermediate Shaft Selection Seavenger Pump - Transmission Suspension - Elektrik Instrument - Pressure Switch <p>2. Gardan Shaft Assy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gardan Shaft - Join Coupling |
| A5 | Sistem Pengereman: Lokomotif | <p>1. Air Brake System:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Compressor and Spare Part - Check Valve - Angle Cock - Hose Connection & Pipe - Air Reservoir - Drain Cock & Stop Cock - Valve Parts - Brake Coupling - Cylinder - Automatic Drivers - Brake - Double Check Valve with Rubber Packing |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Charge Over Cock - Charging Cut Off Pilot - Regulating Cylinder - Tast Ventel - Bell / Horn - Window Wipper Arrangement - Brake Shoe - Distributor Valve Assy - Slang Air Brake - Slack Adjuster - Emergency Brake - Inner Parts Distributor Valve <p>2. Hand Brake and Brake Mechanism:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigging - Hand Brake Lever - Sand Blaser |
| A6 | Bogi: Lokomotif | <p>1. Bogie Assembly</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truck Equipment List - Axie Alternator - Bolster & Truck Frame - Brake Rigging - Coil Spring - Journal Bearing Accessories (Axle Alternator) - Journal Bearing with Housing - Motor Suspension - Sand Pipe Arrangement - Snubber, Horizontal - Snubber, Vertical - Spring Rigging - Traction Motor - Traction Motor Accessories - Traction Motor Gear Case Lubricator - Wheel, Axle, Gear & Journal Bearing - Bogie Accessories <p>2. Wheel and Axle Assembly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combined/ Wheel Set - Axle - Drive Gear - Journal Bearing - Bearing - Axle Box <p>3. Journal Box and Spring Assembly</p> <p>4. Swing Bolster Assembly</p> |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Center Plate Assembly & Center PI - Upper and Lower Swing Bolster Assembly - Spring Assembly - Vertical & Horizontal Oil Damper - Snubber - Conical Rubber Bounded - Rubber Block - Air Spring - Disc. Brake - Brake Pad - Block Rem - Brake Shoe - T-Link - Colipper - Shock Absorber & Kit - Antimonium & Banka Tin - Pen dan Bush - Kawat Las Roda - Wear Plate - Tas Pot - King Pen - Swingen Pendel - Rubber Journal Spring - Bahan Baja Pegas - Brake Accessories |
| A7 | Bodi: Lokomotif | <p>1. Under Frame and Platform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Car Body to Traction Motor - Cable Connector - Coupler Arrangement - Power Plant Mounting - Uncompling Lever Arrangement - Cable Clumps Steel - Truin Line Jumper & Receptable - Platform Signal Light Arrangement - Sido Steps & Hand Rail - Way Side & Battery Receptable - Platform Equipment List - Battery Box Cover Arrangement - Bell, Locomotive - Cable Clamps, Steel - Cable Cleats - Coupler, Draft Gear & Yoke |

7

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | Fuel Hose Arrangement |
| | | Fuel Tank |
| | | Fuel Tank Arrangement |
| | | Pilot Arrangement |
| | | Platform |
| | | Platform Signal Light Arrangement |
| | | Sand Hose Arrangement |
| | | Side Step & Handrail Arrangement |
| | | Spillage Tank Arrangement |
| | | Traction Motor Air Duct (End) |
| | | Traction Motor Air Duct (Middle) |
| | | Traction Motor Cable Connection |
| | | Trainline Jumpers & Receptacles |
| | | Uncoupling Lever Arrangement |
| | | Wayside & Battery Receptacles |
| | | Body Accessories |
| | | |
| | | 2. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine |
| | | - Nose Cab Equipment List |
| | | - Cover Arrangement |
| | | Door Latch |
| | | Handbrake |
| | | Handbrake Rigging |
| | | Light |
| | | 3. Operators Cab Assembly |
| | | - Operator Cab Equipment List |
| | | Control Console, Long Hood Lead |
| | | Control Console, Short Hood Lead |
| | | Controller |
| | | Daylight Signal Arrangement |
| | | Dome Light Arrangement |
| | | Door Latch, Control Compartment |
| | | Door Latch Engine, Nose, Operator Or Radiator Cab |
| | | Door Latch, Locker |
| | | Door Latch, Operator Cab |
| | | Door Latch, Roof |
| | | Door Seal Arrangement |
| | | Engine Gage Panel |

14

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--------------------------------------|
| | | Fire Extinguisher Arrangement |
| | | Foot Switch Arrangement |
| | | Handbrake Ringging |
| | | Headlight |
| | | Operator Cab Accessories |
| | | Operator's Seat Arrangement |
| | | Speed Recorder |
| | | Speed Recorder Arrangement |
| | | Switch, Deadman |
| | | Switch, Sander |
| | | Transmitter/ Driver |
| | | Vigilance Control Panel |
| | | Window Arrangement |
| | | Window Wing |
| | | Window Wiper Arrangement |
| | | - Auxiliary Cab Equipment List |
| | | - Operator Cab |
| | | - Accessories |
| | | - Arrangement |
| | | - Control Console |
| | | - Engine Gauge Panel |
| | | - Slidding Window |
| | | - Window Wing |
| | | - Dome Light Arrangement |
| | | - Dours Latch Control Arrangement |
| | | - Switch Sander & Dead Man |
| | | - Engine Cab |
| | | - Blower Unit |
| | | - Sirnal Middle Front & Rear |
| | | |
| | | 4. Engine Cab Equipment List |
| | | - Air Compressor Drive Shaft |
| | | - Automatic Fire Extinguisher |
| | | - Blower (Traction Motor) |
| | | - Blower Unit |
| | | - Braking Resistor, Dynamic |
| | | - Rectifier |
| | | - Door Latch |
| | | - Engine Cab |
| | | - Engine Cab Accessories |
| | | - Exhaust Cover Arrangement |
| | | - Flexible Coupling (Compressor End) |
| | | - Flexible Coupling (Engine End) |
| | | - Lube Oil Cooler |
| | | - Lube Oil Filter |
| | | - Lube Oil Piping Arrangement |
| | | - Water Piping Arrangement |

6. 1

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | - Engine Cab Accessories |
| | | 5. Radiator Cab Equipment List |
| | | - Air Compressor & Radiator Fan Drive |
| | | - Air Compressor Piping |
| | | - Crossover Walk Arrangement |
| | | - Daylight Signal Arrangement |
| | | - Diverter Valve |
| | | - Door Latch |
| | | - Eddy Current Clutch (ECC) |
| | | - Engine Air Intake Arrangement |
| | | - Exhauster/ Blower |
| | | - Expansion Tank Arrangement |
| | | - Fire Extinguisher Arrangement |
| | | - Gear Unit |
| | | - Hatch Cover Arrangement |
| | | - Headlight |
| | | - Magnet Valve |
| | | - Main Reservoir |
| | | - Radiator Arrangement |
| | | - Radiator Cab |
| | | - Radiator Fan Guard Arrangement |
| | | - Radiator Coolant |
| | | - Radiator Cab Accessories |
| | | 6. Cab Heater / Air Conditioner / Water Cooler |
| | | - Spare Parts and Accessories |
| | | 7. Air Brake Equipment List |
| | | - Air Brake Equipment |
| | | - Air Compressor |
| | | - Air Compressor Filter Arrangement |
| | | - Air Dryer |
| | | - Air Filter, Centrifugal |
| | | - Brake Cylinder |
| | | - Horn |
| | | - Valve, Application Brake |
| | | - Valve, automatic Drain |
| | | - Valve, Bell |
| | | - Valve, Brake |
| | | - Valve, Check |
| | | - Valve, Check & Stainer |
| | | - Valve, Control |
| | | - Valve, Double Check |

12

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG | | |
|-----|----------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| | | - Valve, Emergency Brake | | |
| | | - Valve, Horn | | |
| | | - Valve, Magnet | | |
| | | - Valve, Pilot | | |
| | | - Valve, Relay | | |
| | | - Valve, Safety | | |
| | | - Valve, Sanding | | |
| | | - Valve, Vent | | |
| | | - Air Brake Equipment Accessories | | |
| | | 8. Exterior | | |
| | | - Bingkai Jendela | | |
| | | - Kaca Jendela | | |
| | | - Poly Carbonate | | |
| | | - Acrylic | | |
| | | - Pelat Baja | | |
| | | - Pintu | | |
| | | - Kawat Las | | |
| | | - Kunci-kunci | | |
| | | - Pelat Baja Kembang | | |
| | | - Baja Kanal | | |
| | | - Pipa Baja | | |
| | | - Cat | | |
| | | - Rubber Bellow | | |
| | | - Ram Pengaman Jendela | | |
| | | - Sillicon Sealer | | |
| | | - Tools | | |
| | | - Exterior Accessories | | |
| | | 9. Accessories Interior: | | |
| | | - Kursi | | |
| | | - Plate Alumunium | | |
| | | - Module GFRP | | |
| | | - Rak Barang | | |
| | | - List Karet | | |
| | | - Ceiling Fan | | |
| | | - Exhaust Fan | | |
| | | - Melamine Plastic Hard Board | | |
| | | 10. Module Lavatory | | |
| | | - Module Floor Stainless Steel | | |
| | | - Module GFRP | | |
| | | - Module Closet | | |
| | | - Module Urinoir | | |
| | | - Lavatory Installation | | |
| | | A8 | Alat Perangkai Otomatis Lokomotif, Kereta Rel | 1. Automatic Coupler Assy |
| | | | | 2. Coupler Body |
| | | | | 3. Knuckle |
| | | 4. Rubber Draft Gear | | |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------------|---|
| | | 5. Coupler Accessories |
| A9 | Alat Bantu Lokomotif | 1. Savety Auxiliary: <ul style="list-style-type: none"> - Fire Extinghuiser - Day Light Signal Arrangement - Head Light Assy - Fire Signal Device with Fuse - Radio Locomotive - Water Treatment for Engine Cocing System - Locotrak (Perangkat Pelacak Posisi Lokomotif) 2. Indicator Speed Auxiliary <ul style="list-style-type: none"> - Spedo meter - Auxilliary of Electric Connection - Locomotive Cable & Wire - Terminal Connection - Fiting Parts 3. General Purpose Hardware <ul style="list-style-type: none"> - Compression Fittings - Copper Tubing & Fittings - General Purpose Conduit & Fittings - Locomotive Cable & Wire - Pipe & Fittings - Terminal Connections - Terminals 4. Battery & Kallilog <ul style="list-style-type: none"> - Spareparts and Accessories 5. Coupler Electric <ul style="list-style-type: none"> - MCB - Matching - Cable - Electric Coupler Assy |
| A10 | Mesin Penyegar Udara Lokomotif | 1. Motor Compressor 2. Blower 3. Condensor 4. Compressor 5. Evaporator 6. Expansion Valve 7. Filter Drier 8. Low & High Pressure Cut Out Switch 9. Discharge By Pass Valve 10. Contactor 11. Relay 12. Circuit Breaker |

1. K

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------------------------|---|
| B | Kereta | |
| | 1. Kereta Rel | 1. Diesel (KRD) (Diesel Rail Car) 2. Listrik (KRL) (Electric Rail Car) 3. Diesel Elektrik (KRDE) (Diesel Electric Rail Car) 4. TMC (Track Motor Car) |
| | 2. Kereta | 1. Penumpang Kelas Eksekutif (K1) (<i>Passenger Coach Executive Class</i>) 2. Penumpang Kelas Bisnis (K2) (<i>Passenger Coach Business Class</i>) 3. Penumpang Kelas Ekonomi (K3) (<i>Passenger Coach Economic Class</i>) 4. Kereta Makan (KM) (<i>Dining Coach</i>), Kereta Makan + Pembangkit (KMP) (<i>Dining + Power Coach</i>) 5. Kereta Pembangkit (BP) (<i>Power Cars</i>) 6. Kereta Bagasi (B) (<i>Baggage Cars</i>) 7. Penumpang Kelas Spesial (S) (<i>Passenger Coach Special Class</i>) 8. Kereta Khusus (<i>Special Purpose Cars</i>) 9. Kereta Tidur (<i>Sleep Cars</i>) |
| | 3. Gerbong | 1. Gerbong Terbuka (GB, Yaitu : YYW, ZZOW, TTW, KKBW, Dan Lain Sebagainya 2. Gerbong Tertutup (GT) Yaitu : GW, GGW, GR, dan Lain Sebagainya 3. Gerbong Datar (GD), Yaitu : PPCW, PKPKW, dan lain sebagainya 4. Gerbong Tangki/Silinder (GK) |
| | 4. Kereta Peralatan Khusus | 1. Kereta Inspeksi (<i>Inspection Train</i>) 2. Kereta Penolong (<i>Rescue Train</i>) 3. Kereta Ukur (<i>Measurement Train</i>) 4. Kereta Derek (<i>Crane Train</i>) 5. Kereta Pembangunan dan Perawatan (<i>Construction and Maintenance Track Car</i>) 6. Shunting Vehicle |
| | 5. Komponen /Suku Cadang | 1. Suku Cadang Light Rail Transit (LRT) |
| B1 | Mesin | 1. Diesel Engine Railway Application 2. Sub Kelompok Mekanis Engine : |

EA

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---------------------------------------|
| | | - Main Frame Assembly |
| | | - Crank Case Assembly |
| | | - Gear Case Assembly |
| | | - Cover Front End |
| | | - Engine Control Governor Elektrik |
| | | - Engine Control Governor Mekanik |
| | | - Engine Control Module (ECM) |
| | | - Fuel Pump With AC Motor |
| | | - Card Modules |
| | | - Control Modules |
| | | - Display Module |
| | | - Module Circuit |
| | | - Traction Inverter |
| | | - AC/DC, AC/AC, DC/DC Kit Accessories |
| | | - Coil Spring |
| | | - Bogie Accessories |
| | | - Brake Shoe |
| | | - Brake Accessories |
| | | - Body Accessories |
| | | - Rectifier |
| | | - Blower Rectifier |
| | | - Eddy Current Clutch (ECC) |
| | | - Main Reservoir |
| | | - Radiator Coolant |
| | | - Radiator Cab Accessories |
| | | - Spare Part And Accessories |
| | | - Air Dryer |
| | | - Air Brake Equipment Accessories |
| | | - Poly Carbonate |
| | | - Acrylic |
| | | - Kawat Las |
| | | - Ram Pengaman Jendela |
| | | - Silicon Sealer |
| | | - Tools |
| | | - Exterior Accessories |
| | | - Module GFRP |
| | | - Module Closet |
| | | - Elektrik Coupler Assy |
| | | - Cover Crank Case Inspection |
| | | - Dipstick Assembly |
| | | - Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing |
| | | - Camshaft Gear Drive |
| | | - Camshaft Assembly |
| | | - Bearing Pin |
| | | - Crank Shaft Assembly |
| | | - Timing Gear |



| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--------------------------------------|
| | | - Balance Shaft /Idler Shaft & Gears |
| | | - Cylinder Liner Assembly |
| | | - Connecting Rod Assembly |
| | | - Piston Assembly |
| | | - Covar Wilo |
| | | - Hub |
| | | - Jacking Ring |
| | | - Pump/Gear & Mounting |
| | | - Lube Oil |
| | | - Breather |
| | | - Cylinder Head |
| | | - Prechamber |
| | | - Rocker Support |
| | | - Valve |
| | | - Governor Assy |
| | | - Over Speed Governor |
| | | - V-Belt |
| | | - Ring |
| | | - Seal |
| | | - Screen |
| | | - Sleeve |
| | | - DCA Liquid |
| | | - Gasket |
| | | - Test Kit |
| | | - Stinger |
| | | - Collar |
| | | - Hose |
| | | - Turbo Super Charger |
| | | - Engine Mechanism Accessories |
| | | 3. Air Aintake System: |
| | | - Air Inlet |
| | | - Air Cleaner |
| | | - Air Filter |
| | | - Turbo Super Charger |
| | | - Air Piping & Fitting |
| | | - Air Intake Manifold |
| | | - Exhaust Manifold |
| | | - Stack |
| | | - Air Intake System Accessories |
| | | - Lube Oil System Accessories |
| | | 4. Cooling System: |
| | | - Cooler Drive With Cooling Plat |
| | | - Voith Cooling |
| | | - Unit |
| | | - Cooler Joint |
| | | - Variable Speed Fan With Impeller |
| | | - Water Tank |
| | | - Water Inlet Header |
| | | - Discharger header |

A.A

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------------|---|
| | | - Piping |
| | | - Radiator |
| | | - Fan Drive |
| | | - Cooler & Mounting |
| | | - Water Pump |
| | | - Air Cooler |
| | | - Shutter |
| | | - Regulating |
| | | - Valve Assy |
| | | - Water Treatment |
| | | - Bevel Gear Assy |
| | | - Temperature Control For Cooling Water |
| | | - Cooling System Accessories |
| | | 5. Fuel System: |
| | | - Fuel Tank Arrangement |
| | | - Fuel Tank |
| | | - Fuel Strainer |
| | | - Fuel Injection Pump |
| | | - Fuel Nozzle Assy |
| | | - Fuel Piping & Fitting |
| | | - Fuel Pump With DC Motor |
| | | - Fuel Filter Assy |
| | | - Pre Fuel Tank |
| | | - Fuel System Accessories |
| | | 6. Lube Oil System: |
| | | - Lube Oil Assy |
| | | - Lube Oil Filter/Element |
| | | - Lube Oil Cooler |
| | | - Lube Oil Pipe System |
| | | - Preliminary Lubrication Pump Assy |
| | | - Oil Pump |
| | | - Relay Valve |
| | | - Oil Pressure Switch |
| | | - Low Oil Switch |
| B2 | Sistem Kontrol | 1. Resistor Dynamic Brake |
| | | 2. Thyristor Regulator Assy |
| | | 3. Relay Contractor |
| | | 4. Interlock |
| | | 5. Magnet Switch Reverser |
| | | 6. Control Group |
| | | 7. Compartment With Doors And Covers |
| | | 8. Panel |
| | | 9. Terminal Board |
| | | 10. Voltage Regulator |
| | | 11. Circuit Breaker |
| | | 12. Dead Man Pedal System |
| | | 13. Motor Start |
| | | 14. Pressure Switch |

17

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------|---|
| | | 15. Throttle Valve 16. Pantograph 17. Gto Inverter 18. High Voltage Relay 19. Snubber Assy 20. Voltage Divider 21. Distribution Board 22. DC/DC Converter 23. Converter Control Board 24. Reverse Input Polarity Module 25. Chopper Module 26. Double Pulse Board 27. Chopper Control Board 28. Dynamic Voltage Limitation 29. Rectifier Module 30. HMI Display 31. CCD (Collector Current Device) |
| B3 | Sistem Transmisi Listrik | 1. Traction, Exciter, Aux, Generator - Field Coils - Armature - Gear Case - Brush Holder & Carbon Brush - Power Take Off Gear Unit - Bearing - Auxiliaries 2. Traction Motor : - Housing - Field Coils - Armature - Gear Box - Brush Holder & Carbon Brush - Bearing - Duct TM - Motor Suspension - Accessories TM - Starting Motor Assy - Armature Shaft Pinion & Draft Gear - Rewinding Kit - Traction Motor Assy - IGBT - IGBT Driver - Power Supply Module - Control Board - Mother Board - Contractor Control - Converter - Interface Converter - Filter Capacitor |

1.4

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---------------------------|--|
| | | - Control Relay |
| B4 | Sistem Transmisi Hidrolik | 1. Turbo Transmission : - Housing Assy - Filter Pump - Main Control - Output Drive |
| | | - Reversing Valve - Step Up Gear - Gear Wheels - Cover - Rotor Uniform Part - Input & Output Drive Part - Intermediate Shaft Selector Parts - Selection Seavenger Pump - Transmission Suspension - Electric Instrument - Pressure Switch 2. Gardan Shaft Assy - Gardan Shaft - Joint Coupling |
| B5 | Sistem Pengereman | 1. Air Brake System : - Air Compressor and Spare Parts - Check Valve - Angle Cock - Hose Connection & Pipe - Air Reservoir - Drain Cock & Stop Cock - Valve Parts - Brake Coupling - Cylinder - Automatic Drivers - Double Check Valve With Rubber packing - Charge Over Cock - Charging Cut Off Pilot - Regulating Cylinder - Tast Ventel - Bell/Horn - Window Wipper Arrangement - Brake Shoe - Distributor Valve Assy - Slang Air Brake - Emergency Brake - Inner Parts Distributor Valve - Dual Chamber Air Dryer |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Electronic Control Unit - Brake Control Unit - Magnet Valve - Block Brake Unit - Block Brake Unit with Spring Parking Brake - Anti Skid Valve - Pulse Generator -Speed Sensor - Brake Pipe Coupling - Brake Pad - Pipe Seamless for Brake - Control Valve Kit - Isolating Cock Overhaul Kit - Slack Adjuster Overhaul Kit - Basic Valve Body Overhaul Kit - Kit overhaul Slack Adjuster - Brake Device for KKBW - Air Brake System Accessories <p>2. Hand Brake and Brake Mechanism :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigging - Hand Brake Lever - Sand Blaser - Hand Brake Bellcrank - Triangle - Lingkage - Hand Brake and Brake Mechanism Accessories |
| B6 | Bogie | <p>1. Bogie Assembly</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogie Kits Bolsterless - Bogie Casting Component - Bogie Ancillary Component - Pipe Transom - Pins and Bushes - Safety hanger - Lube Disc - Bogie Assembly Accessories - Wedge <p>2. Wheel and Axle Assembly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Combined/Wheel Set - Axle - Drive Gear - Journal Bearing - Bearing - Axle Box - Kit Overhoul Bearing <p>3. Journal Box and Spring Assembly</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inner Spring - Outer Spring |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | 4. Swing Bolster Assembly: |
| | | - Center Plate Assembly & Center PI |
| | | - Upper and Lower Swing Bolster Assembly |
| | | - Spring Assembly |
| | | - Vertical & Horizontal Oil Damper |
| | | - Snubber |
| | | - Conical Rubber Bounded |
| | | - Pegas Daun |
| | | - Air Spring |
| | | - Disc. Brake |
| | | - Brake Pad |
| | | - Block Rem |
| | | - T-Link |
| | | - Colipper |
| | | - Shock Absorber & Kit |
| | | - Antimonium & Banka Tin |
| | | - Pin & Brush |
| | | - Kawat Las Roda |
| | | - Wear Plate |
| | | - Tas Pot |
| | | - King Pen |
| | | - Swingen Pendel |
| | | - Rubber Journal Spring |
| | | - Bahan Baja Pegas |
| | | - Adjuster Spring |
| | | - Axle Box Housing |
| | | - Bolster Anchor Rubber |
| | | - Bolster Spring |
| | | - Bottom Center Plate |
| | | - Center Plate Linner |
| | | - Center plate Stuffing |
| | | - Conical Bonded Rubber Spring |
| | | - Guide Rubber |
| | | - Hanger Bracket |
| | | - Rubber Buffer |
| | | - Rubber for Side Bearer |
| | | - Side Bearer Housing |
| | | - Swing Link |
| | | - Traction Rod |
| | | - Upper Center Plate |
| | | - Wearing Plate Assy |
| | | - Rotary Shok absorber |
| | | - Conection Link |
| | | - Safety hanger K7 |
| | | - Kit maintenance bogie |
| | | - Stang drad lengkap mur |
| | | - Bolt and Nut for KKBW |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pin and Bush for KKBW - Center pin assembly for KKBW - Hanger assembly for KKBW - Swing Bolster Assembly accessories |
| B7 | Bodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Frame and Platform <ul style="list-style-type: none"> - Car Body to Traction Motor - Cable Connector - Coupler Installation - Power Plant Mocenting - Uncoupling Lever Installation - Cable Clamps Steel - Train Line Jumper & Receptacle - Platform Signal Light Arrangement - Side Steps & Hand Rail - Way Side & battery Receptacle - Channel Steel A36/SS400/SM400/SM490 - Plate SPAC/Corten/SPAH/SUS - Plate High Strength Grade - Plate SS400/SPHC/SPCC - Under frame and platform accessories 2. Lantai: <ul style="list-style-type: none"> - Pelat Baja Gelombang - Unitex - Underseal Coating - Pelat Baja Kembang - Floor accessories 3. Exterior: <ul style="list-style-type: none"> - Bingkai Jendela - Kaca Jendela - Pelat Baja SS400 - Pintu - Kunci-kunci - Pelat Baja Kembang - Baja Kanal SS400 - Pipa Baja - Cat - Rubber Bellow - Load Breaker Switch (LBS) - Acrylic reyben - Apron/Plat jembatan - Box semboyan 21 - Hand grip - Polycarbonate - Exterior accessories |

R. A

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-------------------------|--|
| | | 4. Accessories Interior: - Kursi - Plate Alumunium - Rak Barang - Lis Karet - Ceiling Fan - Exshhaust Fan - Melamine Plastic Hard Board - Single/Double Leaf Door Engine - Flush Valve - Ceiling Speaker - Hand Shower - Gas Spring - Cable WL - Heated Cabinet - Cold Storage - Insulation Material - Microwave - Read Lamp Cleft - Karpet Floor - Vinyle Floor - Double Book - Lonleum - Stainless steel frame - Rollerblind 5. Module Lavatory: - Module Floor Stainles - Module GFRP - Resin - Gelcoat - Mat Strand - Modul Closet - Flushing Toilet System - Non-Flushing Toilet System - Modul Urinoir - Stainless steel toilet - Tangki TRL Assy - Leher Angsa Assy - Flushing Tank assy - Modul Toilet - Modul Urinoir - Modul wastafel - Shower - Kran |
| B8 | Alat Perangkai Otomatis | 1. Automatis Coupler Assy 2. Coupler Body 3. Knuckle 4. Rubber Draft Gear 5. Twist Lock |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------------|--|
| B9 | Alat Bantu | 1. Safety Auxiliary: <ul style="list-style-type: none"> - Fire Extinghuiser - Fire Light Signal Arrangement - Head Light Assy - Fire Signal Device with Fuse - Safety Auxiliary accessories 2. Indicator Speed Auxiliary: <ul style="list-style-type: none"> - Speedo Meter - Auxiliary of Electric Connection - Terminal Connection - Fitting Parts - Indicator speed Auxiliary accessories 3. Coupler Electric <ul style="list-style-type: none"> - MCM - Matching - Cable - Male/Female Connector - Cable Shoe - Crimping Equipment - Coupler electric accessories |
| B9A | Alat Bantu Keselamatan Manusia | Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Masinis |
| B9B | Alat Bantu Evakuasi Sarana | 1. Rerailing Equipment 2. Rescue Tools 3. Kendaraan Evakuasi |
| B10 | Mesin Penyegar Udara | 1. Air Conditioner <ul style="list-style-type: none"> - Compressors - Motor Blower Evaporator - Condensor Coil - Thermostatic Expansion Valve - Filter Drier - Low and high Pressure Cut Out Switch - Discharge By Pass Valve - Contractor - Timer Relay - Mini Circuit Breaker (MCB) - Coil Evaporator - Motor + Fan Condensor - Fan Evaporator/Blower - Receiver Tank - Low Frequency Relay (LFR) - Low Voltage Relay (LVR) - Phase Sequence Relay (PHCR) - Connector Plug - Cassing Air Conditioner |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---|---|
| | | - Air Conditioner accessories |
| B11 | Senjata dan sistem persenjataan yang melekat pada kereta api yang diimpor atau diperoleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. | |
| | | |
| II | Prasarana Kereta Api | |
| A | Peralatan Untuk Perbaikan/Pemeliharaan Jalur Kereta Api | 1. 1 Hand Tie Temper Machine (HTT), Spare Parts and Accessories |
| | | 2. Multi Tie Temper Machine (MTT), Spare Parts and Accessories |
| | | 3. Ballast Profilling Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 4. Ballast Compactor Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 5. Ballast Cleaning Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 6. Rail Welding Machine, Spare parts, bevel chaam fering, straightening and Accessories |
| | | 7. Universal Purpose Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 8. Track Recording Car, Spare Parts and Accessories |
| | | 9. Hydrolick Tamping Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 10. Excavator for Track Maintenance |
| | | 11. Track Motor Car, Spare Parts and Accessories |
| | | 12. Rail Jack |
| | | 13. Track Gauge Measurement Device |
| | | 14. Rail Optic |
| | | 15. Rail Lubricator |
| | | 16. Mactrack |
| | | 17. Rail Ultrasonic Test |
| | | 18. Ultrasonic Thickness Indicator |
| | | 19. Toolkit Engine |
| | | 20. Rollers for Sliding Bridge |
| | | 21. Manual Jack |
| | | 22. Hydraulick jack |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | 23. Hand Winch |
| | | 24. Winch Machine |
| | | 25. Air Impact Wrench |
| | | 26. Torsion Wrench |
| | | 27. Installation Tool for Bolts |
| | | 28. River Cutter |
| | | 29. Trolley |
| | | 30. Air Compressor Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 31. Pneumatic Boring Machine |
| | | 32. Pneumatic Riveting Machine |
| | | 33. Band Saw Machine |
| | | 34. Flame Cutting Machine |
| | | 35. Boring Machine |
| | | 36. Welding Machine, Spare Parts and Accessories |
| | | 37. Weld Shear Cutter |
| | | 38. Gantry Crane |
| | | 39. Over Hed and Mobile Crane |
| | | 40. Rivet Stamping Machine |
| | | 41. Grinding machine/ Profil |
| | | 42. Electric Heater Furiace for Rivet |
| | | 43. Electric Generator |
| | | 44. Welding Generator |
| | | 45. Rivet Heater Furnance |
| | | 46. Pneumatic Hammer |
| | | 47. Hammer Head (Snaper) |
| | | 48. Driving Die for Rivet |
| | | 49. Blasting Machine |
| | | 50. Bending Machine |
| | | 51. Pulling Machine (Track) |
| | | 52. Rail Abbrasive Cutting Machine |
| | | 53. Waterpass (Level) |
| | | 54. Echo Sounding Devices |
| | | 55. Airless Spary Painting |
| | | 56. Paint Thickness Meter |
| | | 57. Hygrometer |
| | | 58. Dew Point Calculator |
| | | 59. Magnetic Steel Thermometer |
| | | 60. Hight Strength Bolt /Huck Bolt |
| | | 61. Rivet Ordinary Bolt |
| | | 62. Drift Pins |
| | | 63. Steel Grid |
| | | 64. Paint |
| | | 65. Drill Bits |
| | | 66. Reamer |
| | | 67. Special Steel |
| | | 68. Water Pump |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | 69. Tackle Block |
| | | 70. Steel Reinforcement |
| | | 71. Pneumatic Concrete Breaker |
| | | 72. Bubut Roda |
| | | 73. Bubut Umum |
| | | 74. mesin Tes Pegas |
| | | 75. Bogie Cam Industry Equipment |
| | | 76. Soil Investigation Equipment |
| | | 77. Accelerometer |
| | | 78. CBR Test (in place) |
| | | 79. Cone Penetration Test (Sondir) 10 Ton |
| | | 80. Cone Penetration Test (Sondir) 2,5 Ton |
| | | 81. Cone Penetrometer |
| | | 82. Core Drilling |
| | | 83. DCPTest (Dynamic Cone Penetration Test) |
| | | 84. Density Gauge |
| | | 85. Field Vane Test |
| | | 86. Geolistrik |
| | | 87. Hand Boring / Bor Tangan |
| | | 88. Inclinator |
| | | 89. Boring Machine / Bor Mesin |
| | | 90. Pocket Penetrometer |
| | | 91. Rubber Balloon |
| | | 92. Soil Compactor |
| | | 93. SPT Hammer Test |
| | | 94. Strain Gauge |
| | | 95. Tape Extensometer |
| | | 96. Soil Laboratory |
| | | 97. Aggregate Crushing Value |
| | | 98. Automatic Ekstruder |
| | | 99. CBR Test (Lab) |
| | | 100. Climatic Chamber |
| | | 101. Compression Test |
| | | 102. Consolidation Test / Oedometer |
| | | 103. Density Moisture |
| | | 104. Direct Shear |
| | | 105. Double Probe Density |
| | | 106. Hydrometer |
| | | 107. Laboratory Water Bath |
| | | 108. Automatic Proctor |
| | | 109. Soil Mixer |
| | | 110. Soil Volume Change Meter |
| | | 111. Speedy Moisture Tester |
| | | 112. Swelling Test |
| | | 113. Test Sleeve |
| | | 114. Triaxial |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---|---|
| | | 115. Unconvined Test |
| | | 116. Vibrating Table |
| | | 117. Soil Color Contrast |
| | | 118. Laboratory Oven |
| | | 119. Ballast Testing |
| | | 120. Los Angeles Abrasion |
| | | 121. Ball bearing for Abrasion Testing Machine |
| | | 122. Geodetic Equipment |
| | | 123. Theodolit |
| | | 124. Total Station |
| | | 125. Lighting Equipment |
| | | 126. Hammer Test |
| | | 127. Digital Measurement Equipment |
| | | 128. Civil & Geodetic Engineering Software |
| | | 129. Tool Kit Electric |
| | | 130. Thermit Weld Shearing Machine |
| | | 131. Rail Cutter abrasive |
| | | 132. Portable rail section measuring device |
| | | 133. Jack Hammer |
| | | 134. Shear wrench |
| | | 135. Tirpon |
| | | 136. Elastomer jembatan |
| | | 137. Teflon |
| | | 138. Chaun block |
| | | 139. Kawat tali baja |
| | | 140. Heat hot rivet (sanper) |
| | | 141. Iron blower (dapur keling) |
| | | 142. Drop hammer (tiang dan palu baja peranca) |
| | | 143. Cordless impact dan aksesoris |
| | | 144. Forklift |
| | | 145. Excavator |
| | | 146. Dongkrak |
| | | |
| B | Rolling Stock (Peralatan Perawatan Prasarana) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Multi Tie Temper Unimat Compact 08-275/3S 2. Multi Tie Temper 3. MARK IV HD J2 Production/ Switch Temper 4. MATISA B45 D 04542 DGR 5. Bridge Inspection Car 6. Rail Road Loader Gisamar KGT/V |



| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|------------------------------------|--|
| | | 7. Double Acting Loader Vaia Car V 504 F+ |
| | | 8. Road Rail Vehicle Geismar V2R-500 |
| | | 9. Telescopic Railway Crane KIROW KRC 800N |
| | | 10. Multitasker Railway Crane KIROW KRC 1200 N |
| | | 11. Forklift Dosan |
| | | 12. Moveable Crane (Rough Terrain Crane GR 120 NL) |
| | | 13. Ground Penetrating Radar System |
| | | 14. Track and Turnout Measuring Tools |
| | | 15. Inspection and Measurement data management and analysis software |
| | | 16. Turnout Geometry Measurement Trolley |
| | | 17. Sheepfoot/Tamping Roller |
| | | 18. Ultrasonic with Track Motor Trolley |
| | | 19. Rail Grinding Machine |
| | | 20. Track Motor Car |
| | | 21. Elevated Bucket Truk |
| | | 22. Vehicle Maintenance |
| | | 23. Gerbong Datar |
| | | 24. Ultrasonic portable |
| | | 25. Portable electronic straightness Measurer |
| | | 26. Horizontal Hydraulic Rail Bender |
| | | 27. Concrete crack detector |
| | | 28. Bridge Inspection Vehicle Maintenance |
| | | |
| C | Maintenance Part for Rolling Stock | 1. Air Compressor |
| | | 2. Arc Welding Machine |
| | | 3. Battery Charger |
| | | 4. Cut of shaw |
| | | 5. Diesel Fuel Tank and Dispensing |
| | | 6. Drill Press Bench Mounted |
| | | 7. Drill Press Floor Mounted |
| | | 8. Electro Hydraulic Compact pump |
| | | 9. Electronic Diagnostic and Repair Set |
| | | 10. Digital Multimeter |
| | | 11. Lab Power Supply |

RA

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | 12. DDS funktinsgenerator |
| | | 13. Digital oscilloscope, TFT display |
| | | 14. Cable knife |
| | | 15. Electrician's scissor |
| | | 16. Magnetic pick-up tool telescopic |
| | | 17. Inspection mirror |
| | | 18. Dust brush |
| | | 19. ic tweeter |
| | | 20. PLCC Extractor |
| | | 21. De soldering lever |
| | | 22. Soldering iron set, with 2 cards of soldering wire and soldering paste |
| | | 23. De soldering pump |
| | | 24. Multimeter |
| | | 25. Crack detection set |
| | | 26. Crack detection (magnetic flaw detector) |
| | | 27. Notebook |
| | | 28. Fork lift Large |
| | | 29. Fork lift Medium |
| | | 30. Fork lift Reach Truck |
| | | 31. Generator Set |
| | | 32. Greas Dispensing Equipment |
| | | 33. Greas Gun |
| | | 34. Grinder Bench Mounted |
| | | 35. Grinder Floor Mounted |
| | | 36. Hacksaw |
| | | 37. Hidraulic Press |
| | | 38. High Pressure Washer |
| | | 39. Hose Crimping Device Hydraulic Operation |
| | | 40. Hydraulic Pump and Motor |
| | | 41. Lathe/ SP250X160CE |
| | | 42. Lifting Jack |
| | | 43. Lifting Table Scissor |
| | | 44. LPG Torch Cutting Machine |
| | | 45. Milling machine |
| | | 46. Oil Drain/ Disensing Equipment |
| | | 47. Palet Truck |
| | | 48. Part Washer Small |
| | | 49. Part Washer Ultrasonic |
| | | 50. Pipe Threading Cutting |
| | | 51. Portable Genset |
| | | 52. Radial Drilling Machine |
| | | 53. Set Hidraulic Pump |
| | | 54. Tap and Die |
| | | 55. Trolley, Pushtype |

A

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | 56. Drill electric |
| | | 57. Sabre Saw metal cutting |
| | | 58. Impact wrench pneumatic |
| | | 59. Grinder electric |
| | | 60. Nut screw driver light pneumatic |
| | | 61. Nut screw driver light battery |
| | | 62. Nut screw driver medium battery |
| | | 63. Wrenches set open dan closed end |
| | | 64. Hexagon wrenches allen keys |
| | | 65. Socket wrenches |
| | | 66. Screw driver |
| | | 67. Adjustable wrenches |
| | | 68. Plier flat nose straight insulated handle |
| | | 69. Plier needle nose straight insulated handle |
| | | 70. Plier combination type insulated handle |
| | | 71. Wire cutter insulated handle |
| | | 72. Wire stripper insulated handle |
| | | 73. Water pump plier |
| | | 74. Plier internal retaining ring |
| | | 75. Plier external retaining ring |
| | | 76. Hacksaw with blades |
| | | 77. Hammer steel |
| | | 78. Mallet |
| | | 79. Vernier |
| | | 80. Measuring tape |
| | | 81. Steel ruler |
| | | 82. Torque wrenches adjustable hexagon |
| | | 83. Tool boxes hand carry type |
| | | 84. Wrenches set open and closed end |
| | | 85. Hexagon wrenches allen keys |
| | | 86. Socket wrenches |
| | | 87. Screw driver |
| | | 88. Adjustable wrenches |
| | | 89. Plier flat nose straight insulated handle |
| | | 90. Plier needle nose straight insulated handle |
| | | 91. Plier combination type insulated handle |
| | | 92. Wire cutter insulated handle |
| | | 93. Wire stripper insulated handle |
| | | 94. Water pump plier |

FR

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 95. Plier internal retaining sing |
| | | 96. Plier external retaining ring |
| | | 97. Hammer steel |
| | | 98. Mallet |
| | | 99. Cable cutter |
| | | 100. Bolt cutter |
| | | 101. Tin Snip |
| | | 102. Hack Saw with blades |
| | | 103. Micrometer |
| | | 104. Vernier |
| | | 105. Measuring tape |
| | | 106. Steel ruler |
| | | 107. Chisel and punches |
| | | 108. Torque wrenches hexagon |
| | | 109. Tool boxes hand carry |
| | | 110. Tool trolley |
| | | 111. Tool |
| | | 112. Wire crimping set |
| | | 113. Soldering set |
| | | 114. Contactes termometer |
| | | 115. Voltcraft IR Thermometer |
| | | 116. Stinger System |
| | | 117. Peralatan Perawatan Bogie |
| | | 118. Peralatan Komunikasi |
| | | 119. Moveable Working Platform |
| | | 120. Peralatan Pengecatan |
| | | 121. Drying Oven |
| | | 122. Peralatan Perawatan Bearing |
| D | Maintenance Part for MTT MARK IV | 1. Cable, ml 2.m/spltr o.6m sh |
| | | 2. Cable, m,i2-mlf o,5m sh s-co |
| | | 3. Cable, m12.m/f 5m sh s.cond |
| | | 4. Cable,ml2-m/pig 8m 4.cond |
| | | 5. Jupiter 2 digital module |
| | | 6. Jupiter 2 analod module |
| | | 7. Cable, m12 m/f network 5m |
| | | 8. Cable, m 12-mldin-a diode 5m |
| | | 9. Cable, m 12-mldin.a trans 1m |
| | | 10. Cable, m 12-mldin.a trans 5m |
| | | 11. Cable, ml 2.m/din-I diode 3m |
| | | 12. Cable, j1939 no resistor |
| | | 13. M12 output speed cond |
| | | 14. Cable,m12.f/pig 5m sh s-co |
| | | 15. Signal conditioner. M,i2 |
| | | 16. Cable,m 12-mldin-i diode 5m |
| | | 17. Sender, temp, assy, 100-30 |
| | | 18. Pressure xducer assy, soop |
| | | 19. Plug.in relay, 24v |

1 R

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--------------------------------|
| | | 20. Break out box |
| | | 21. Connector m12 "t" |
| | | 22. Jupiter ii scanner board a |
| | | 23. Jupiter 2 hd 32 module |
| | | 24. Jii j42 pic module assy |
| | | 25. Jam box, g5 |
| | | 26. H.bridge driver |
| | | 27. Projector lamp, bullet |
| | | 28. Cable,m12-fipig 1om sh 5-c |
| | | 29. Contact block (no-no) |
| | | 30. Contact block |
| | | 31. Limit switch assy |
| | | 32. Long adj operating lever |
| | | 33. 15 amp fuse |
| | | 34. Miniature lamp |
| | | 35. Potentiometer |
| | | 36. Linear transducer |
| | | 37. Linear transducer magnet |
| | | 38. In line fuel filter |
| | | 39. Filter element |
| | | 40. O-ring kit |
| | | 41. Coil, solenoid op valve |
| | | 42. Pressure transducer, 1 ok |
| | | 43. Solenoid coil |
| | | 44. Coil, do5 24vdc, din |
| | | 45. Seal kit |
| | | 46. Pilot valve, 24vdc, do3 |
| | | 47. Corl, 24vdc, d03 |
| | | 48. Hose assembly |
| | | 49. DC,hydraulic fitting |
| | | 50. Coil |
| | | 51. Standard tie |
| | | 52. Tie standard clamp |
| | | 53. Rotary actuator |
| | | 54. Push/pull air valve |
| | | 55. Air cyl single acting |
| | | 56. Switch, neutral |
| | | 57. Humphrey valve |
| | | 58. Hyd motor |
| | | 59. Front hydraulic motor |
| | | 60. Motor-hydrau lic |
| | | 61. Multi.section gear pump |
| | | 62. Piston pump (rexroth) |
| | | 63. Linear actuator assy |
| | | 64. Receiver, double barrel |
| | | 65. Orb o.ring assortment |
| | | 66. Kit, seal, cart. valve |
| | | 67. Tubing, plastic |
| | | 68. Seal kit 4" cyl, 2"rod |
| | | 69. Valve, relay |
| | | 70. Regulator |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--|------------------------------|
| | | 71. Air singl pilot valve |
| | | 72. Press red valve assy |
| | | 73. N,c.modulating element |
| | | 74. Air valve k-series |
| | | 75. Cab control valve |
| | | 76. Solenoid valve 4 way |
| | | 77. Brake shoe |
| | | 78. Rh carbide tamping tool |
| | | 79. Lh carbide tamping tool |
| | | 80. Hook, insert machining |
| | | 81. Filter element |
| | | 82. Line hyd filter |
| | | 83. Air line filter element |
| | | 84. Desiccant cartridge |
| | | 85. Filter, fuel |
| | | 86. Fuel filter element |
| | | 87. Engine oil filter |
| | | 88. Water filter |
| | | 89. Air filter primary air |
| | | 90. Filter secondary filter |
| | | 91. Element windshield |
| | | 92. Wiper blade windshield |
| | | 93. Wiper blade filter |
| | | 94. Element |
| E | Maintenance Part for Tamping Machine Type 09-16CSM | 1. Piston rod |
| | | 2. Piston |
| | | 3. Piston crew |
| | | 4. Piston rod bush |
| | | 5. Straight pin |
| | | 6. Threaded pin |
| | | 7. Multipoint head cap screw |
| | | 8. Schnorr-lock washer |
| | | 9. Plain bearing bush |
| | | 10. Bearing bush |
| | | 11. Piston rod complete |
| | | 12. Hexagon bolt |
| | | 13. Tamping |
| | | 14. Disc |
| | | 15. Hexagon nut |
| | | 16. Bush |
| | | 17. O-ring |
| | | 18. Gasket |
| | | 19. Nutring |
| | | 20. Felt ring |
| | | 21. Hexagon socket screw |
| | | 22. Spring key |
| | | 23. Annular gear |
| | | 24. Groove nut |
| | | 25. Locking plate |
| | | 26. Adjusting screw |

18

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|-------------------------------|
| | | 27. Throttle |
| | | 28. Guide bush |
| | | 29. Screw plug without bundle |
| | | 30. Spring |
| | | 31. Steel ball |
| | | 32. Universal joint |
| | | 33. Round nut |
| | | 34. V-ring |
| | | 35. Laminum adjusting ring |
| | | 36. Spacer sleeve |
| | | 37. Spring washer |
| | | 38. Tamping arm bolt |
| | | 39. Connecting rod bolt |
| | | 40. Washer |
| | | 41. Distributor |
| | | 42. Piston detector |
| | | 43. Cap nut |
| | | 44. Packing ring |
| | | 45. Valve body |
| | | 46. Sealing and clamping ring |
| | | 47. Spiral strap |
| | | 48. Tube |
| | | 49. Hose nipple |
| | | 50. Screw bushing |
| | | 51. 2-s-threaded joint |
| | | 52. Carrier |
| | | 53. Axle |
| | | 54. Slide bearing |
| | | 55. Pressure spring |
| | | 56. Shaft sealing ring |
| | | 57. Circlip |
| | | 58. Fitting disc |
| | | 59. Split pin |
| | | 60. Pneumatic cylinder |
| | | 61. slider |
| | | 62. Guide bolt |
| | | 63. Press.liner |
| | | 64. Pin |
| | | 65. Castle nut |
| | | 66. Axial thrust washer |
| | | 67. Nut |
| | | 68. Screw plug |
| | | 69. Sealing ring |
| | | 70. Intermediate ring |
| | | 71. Tension sleeve |
| | | 72. Running disc |
| | | 73. Flat lubricator nipple |
| | | 74. Feeler rod |
| | | 75. Slide plate |
| | | 76. Spacer ring |
| | | 77. Deep groove ball bearing |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|--|
| | | 78. Bearing support |
| | | 79. Spacer bush |
| | | 80. Roller |
| | | 81. Countersunk head screw |
| | | 82. Flange |
| | | 83. Shaft nut |
| | | 84. Tapered roller bearing |
| | | 85. Gear wheel |
| | | 86. Nilos ring |
| | | 87. Clutch half |
| | | 88. Temperature switch/transmitter |
| | | 89. Chord wheel |
| | | 90. Cover |
| | | 91. Fixing bolt |
| | | 92. Block |
| | | 93. Cheese head screw |
| | | 94. Flat spiral spring |
| | | 95. Steel chord |
| | | 96. Rope clamp |
| | | 97. Countersunk screw |
| | | 98. Potentiometer |
| | | 99. Cable pulley |
| | | 100. Shaft |
| | | 101. Dip stick |
| | | 102. Carrier complete |
| | | 103. Tension spring, stainless |
| | | 104. Bracket |
| | | 105. Slide rod |
| | | 106. End connection |
| | | 107. Cord guide for roller transmitter |
| | | 108. Incandescent lamp |
| | | 109. Halogen lamp |
| | | 110. Temperature sensor |
| | | 111. Solid state relay |
| | | 112. Potentiometer |
| | | 113. Proximity switch |
| | | 114. Relay |
| | | 115. Digital indicator |
| | | 116. Carrier-reversible |
| | | 117. Plug |
| | | 118. Socket |
| | | 119. Magnet |
| | | 120. Power supply |
| | | 121. Display unit |
| | | 122. Milliammeter |
| | | 123. Voltmeter |
| | | 124. Relais |
| | | 125. Automatic cutout |
| | | 126. Safety relay |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--|---|
| | | 127. Push button |
| | | 128. Led-module |
| | | 129. Switch head |
| | | 130. Flange for contact element |
| | | 131. Contact element |
| | | 132. Fluorescent lamp |
| | | 133. Fluorescent tube inverter |
| | | 134. Rotary encoder |
| | | 135. Vibration element |
| | | 136. Housing bearing+tension sleeve |
| | | 137. Pull cable |
| | | 138. Tension spring |
| | | 139. Split taper socket |
| | | 140. Clamping pin |
| | | 141. Cylinder |
| | | 142. Mushroom-shaped pressure piece |
| | | 143. Adaptor |
| | | 144. Valve |
| | | 145. Pressure transducer |
| | | 146. Pressure gauge |
| | | 147. Cut-off valve |
| | | 148. Safety valve |
| | | 149. Temperature switch |
| | | 150. Liquid indicator |
| | | 151. Reducing valve |
| | | 152. Switch |
| | | 153. Thermal switch/ |
| | | 154. Diode |
| | | 155. Pr.circuit board complete |
| | | 156. Chart/ 100 pieces |
| | | 157. Tachometer |
| | | 158. Limit switch |
| | | 159. Air hose |
| | | 160. Single pressure gauge |
| | | 161. Check throttle |
| | | 162. Terminal |
| | | 163. Compression hose |
| | | 164. Idling governor |
| | | 165. Idling control valve |
| | | 166. Pressure regulator |
| | | 167. Packing |
| | | 168. Nozzle |
| | | 169. Assembling auxiliaries |
| F | Maintenance Part for Tamping Machine Type 09-32CSM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Distributor 2. Cap nut 3. Packing ring 4. Valve body 5. Sealing- and clamping ring |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|------------------------------------|
| | | 6. Spiral trap |
| | | 7. Tube |
| | | 8. Hose nipple |
| | | 9. Screw bushing |
| | | 10. 2-s-threaded joint |
| | | 11. Piston rod |
| | | 12. Piston |
| | | 13. Piston piston screw |
| | | 14. Piston rod bush |
| | | 15. Straight pin |
| | | 16. Threaded pin |
| | | 17. Multipoint head cap screw |
| | | 18. Schnorr-lock washer |
| | | 19. Plain bearing bush |
| | | 20. Piston rod complete |
| | | 21. Bearing bush |
| | | 22. Disc |
| | | 23. Spacer sleeve |
| | | 24. Hexagon nut |
| | | 25. Spring washer |
| | | 26. Tamping arm bolt |
| | | 27. Connecting rod bolt |
| | | 28. Washer |
| | | 29. Bush |
| | | 30. Bearing washer |
| | | 31. Split spin |
| | | 32. Hexagon socket screw |
| | | 33. Hexagon bolt |
| | | 34. Tamping way limitation |
| | | 35. Pin |
| | | 36. Buffer stop |
| | | 37. Nut |
| | | 38. Lock nut |
| | | 39. Cylinder |
| | | 40. Universal joint |
| | | 41. Round nut with drilled holes |
| | | 42. Cover |
| | | 43. Tamping |
| | | 44. O-ring |
| | | 45. Gasket |
| | | 46. Nutring |
| | | 47. Felt ring |
| | | 48. Guide bush |
| | | 49. Mushroom-shaped pressure piece |
| | | 50. Throttle |
| | | 51. Screw plug |
| | | 52. Screw plug without bundle |
| | | 53. Spring |
| | | 54. Steel ball |
| | | 55. Carrier |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|-------------------------------------|
| | | 56. Axle |
| | | 57. Slide bearing |
| | | 58. Pressure spring |
| | | 59. Shaft sealing ring |
| | | 60. Circlip |
| | | 61. Fitting disc |
| | | 62. Spring pin |
| | | 63. Pneumatic cylinder |
| | | 64. Slider |
| | | 65. Guide bolt |
| | | 66. Press.liner |
| | | 67. Castle nut |
| | | 68. Axial thrust washer |
| | | 69. Sealing ring |
| | | 70. Spring key |
| | | 71. Intermediate ring |
| | | 72. Tension sleeve |
| | | 73. Running disc |
| | | 74. Flat lubricator ring |
| | | 75. Slide plate |
| | | 76. Spacer ring |
| | | 77. Deep groove ball bearing |
| | | 78. Feeler rod |
| | | 79. Bearing support |
| | | 80. Spacer bush |
| | | 81. Roller |
| | | 82. Countersunk head screw |
| | | 83. Flange |
| | | 84. Running wheel |
| | | 85. Tapered roller bearing |
| | | 86. Locking plate |
| | | 87. Shaft nut |
| | | 88. Gear wheel |
| | | 89. Nilos ring |
| | | 90. Clutch half |
| | | 91. Rotary encoder |
| | | 92. Rubber bush |
| | | 93. Spring element |
| | | 94. Vibration element as drawn |
| | | 95. House bearing+tension sleeve |
| | | 96. Pull cable |
| | | 97. Tension spring |
| | | 98. Split taper socket |
| | | 99. Clamping |
| | | 100. Annular gear |
| | | 101. Packing |
| | | 102. Nozzle |
| | | 103. Assembling auxiliaries |
| | | 104. Mushroom-shaped pressure piece |
| | | 105. Pressure transducer |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---|
| | | 106. Pressure gauge |
| | | 107. Cut-off valve |
| | | 108. Safety valve |
| | | 109. Temperature switch |
| | | 110. Liquid indicator |
| | | 111. Reducing valve |
| | | 112. Switch |
| | | 113. Thermal switch |
| | | 114. Prop. Control valve |
| | | 115. Temperatura switch/ transmitter |
| | | 116. Hydraulic motor |
| | | 117. Rope clamp |
| | | 118. Chord wheel |
| | | 119. Fixing bolt |
| | | 120. Block |
| | | 121. Cheese head screw |
| | | 122. Flat spiral spring |
| | | 123. Countersunk screw |
| | | 124. Potentiometer |
| | | 125. Roller transmitter |
| | | 126. Cable pulley |
| | | 127. Shaft |
| | | 128. Dip stick |
| | | 129. Carrier complete |
| | | 130. Tension spring, stainless |
| | | 131. Bracket |
| | | 132. Slide rod |
| | | 133. Steel chord |
| | | 134. End connection |
| | | 135. Cord guide for roller transmitter |
| | | 136. Incandescent lamp |
| | | 137. Halogen lamp |
| | | 138. Temperature sensor |
| | | 139. Potentiometer |
| | | 140. Proximity switch |
| | | 141. Digital indicator |
| | | 142. Carrier-reversible |
| | | 143. Plug |
| | | 144. Socket |
| | | 145. Magnet |
| | | 146. Power supply |
| | | 147. Display unit |
| | | 148. Milliammeter |
| | | 149. Voltmeter |
| | | 150. Automatic cutout |
| | | 151. Push button |
| | | 152. Led-module |
| | | 153. Switch head |
| | | 154. Flange for contact element |

15

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---|--|
| | | 155. Contact element |
| | | 156. Fluorescent lamp |
| | | 157. Fluorescent tube inverter |
| | | 158. Diode |
| | | 159. Pr.circuit board complete |
| | | 160. Adaptor |
| | | 161. Seal kit |
| | | 162. Support cylinder |
| | | 163. Valve |
| | | 164. Fuse |
| | | 165. Tachometer |
| | | 166. Limit switch |
| | | 167. Single pressure gauge |
| | | 168. Check throttle |
| | | 169. Terminal |
| | | 170. Compressing hose |
| | | 171. Idling governor |
| | | 172. Idling control valve |
| | | 173. Pressure regulator |
| | | 174. Seal ring |
| | | 175. Laminum adjusting ring |
| | | 176. V-ring |
| | | 177. Tamping tyne |
| | | 178. Clamp roller |
| | | 179. Filter cartridge |
| | | 180. Oil filter |
| | | 181. Profile packing |
| | | 182. Fuel filter |
| | | 183. Air filter element |
| | | 184. Air filter cartridge |
| | | 185. V-belt |
| | | 186. Air filter |
| | | 187. Charging filter |
| | | 188. Filter |
| | | 189. Solid state relay |
| | | 190. Relay |
| | | 191. Relais |
| | | 192. Safety relay |
| | | 193. Wiper blade |
| | | 194. Time relay |
| | | 195. Relay/11pol. |
| | | 196. Relay module |
| | | 197. Operational amplifier |
| | | 198. Relay base |
| | | 199. Levell.cord |
| | | 200. Air hose |
| | | 201. Cartridge with drying agent |
| G | Maintenance Part for Tamping Machine Type 08-275/3S | 1. Sel ring 2. Tamping tyne 3. Tamping tyne long h |

11

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---------------------------------|
| | | 4. Seal kit |
| | | 5. Laminum adjusting ring |
| | | 6. V-ring |
| | | 7. Fitting disc |
| | | 8. Gasket |
| | | 9. Oil filter |
| | | 10. Fuel filter |
| | | 11. Air filter element |
| | | 12. Air filter cartridge |
| | | 13. V-belt set |
| | | 14. Clamp roller |
| | | 15. Filter cartridge |
| | | 16. Charging filter |
| | | 17. Filter |
| | | 18. Wiper blade 508 |
| | | 19. Relais |
| | | 20. Safety switch relay |
| | | 21. Relay module |
| | | 22. Relay |
| | | 23. Impulse relay |
| | | 24. Operational amplifier |
| | | 25. Time relay |
| | | 26. Transistor |
| | | 27. Levell.cord |
| | | 28. Cartridge with drying agent |
| | | 29. Axle |
| | | 30. Bearing bush |
| | | 31. Spacer ring |
| | | 32. Disc |
| | | 33. Castle nut |
| | | 34. Split pin |
| | | 35. Connecting rod bolt |
| | | 36. Bush |
| | | 37. Washer |
| | | 38. Schnorr-lock washer |
| | | 39. Hexagon nut |
| | | 40. Flat lubricator nipple |
| | | 41. Pin |
| | | 42. Rubber ring |
| | | 43. Nut |
| | | 44. Tamping arm bolt |
| | | 45. Spacer sleeve |
| | | 46. Dist.washer |
| | | 47. Spring washer |
| | | 48. Hexagon bolt |
| | | 49. Hexagon socket screw |
| | | 50. Annular gear |
| | | 51. Locking plate |
| | | 52. Groove nut |
| | | 53. Spring key |
| | | 54. Locking screw |

1 /

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|----------------------------------|
| | | 55. Cap nut |
| | | 56. Piston rod |
| | | 57. Piston |
| | | 58. Piston screw |
| | | 59. Piston rod bush |
| | | 60. Cover |
| | | 61. Straight pin |
| | | 62. Threaded pin |
| | | 63. Multipoint head cap screw |
| | | 64. Plain bearing bush |
| | | 65. Piston rod complete |
| | | 66. Lock nut |
| | | 67. Cylinder |
| | | 68. Universal joint |
| | | 69. Circlip |
| | | 70. Round nut with drilled holes |
| | | 71. Throttle |
| | | 72. Guide bush |
| | | 73. Screw plug without bundle |
| | | 74. Spring |
| | | 75. Steel ball |
| | | 76. O-ring |
| | | 77. Nutring |
| | | 78. Felt ring |
| | | 79. Distributor |
| | | 80. Packing ring |
| | | 81. Valve body |
| | | 82. Sealing- and clamping ring |
| | | 83. Screw |
| | | 84. Spiral strap |
| | | 85. Tube |
| | | 86. Screw bushing |
| | | 87. 2-s-threaded joint |
| | | 88. Scraper |
| | | 89. Rubber disc |
| | | 90. Carrier |
| | | 91. Control rod |
| | | 92. Pressure spring |
| | | 93. Shaft sealing ring |
| | | 94. Pneumatic cylinder |
| | | 95. Slider |
| | | 96. Guide bolt |
| | | 97. Grease nipple |
| | | 98. Lifting hook |
| | | 99. Coupling bolt |
| | | 100. Felt strip |
| | | 101. Press.liner |
| | | 102. Axle bracket |
| | | 103. Single pressure gauge |
| | | 104. Check throottle |
| | | 105. Terminal |



| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|------------------------------------|
| | | 106. Compression hose |
| | | 107. Needle bearing |
| | | 108. Axial cylinder roller bearing |
| | | 109. Running wheel |
| | | 110. Flange |
| | | 111. Tapered roller bearing |
| | | 112. Shaft nut |
| | | 113. Dis |
| | | 114. Deep groove ball bearing |
| | | 115. Gear wheel |
| | | 116. Nilos ring |
| | | 117. Screw plug |
| | | 118. Clutch half |
| | | 119. Rotary encoder |
| | | 120. Rubber bush |
| | | 121. Spring element |
| | | 122. House bearing+tension sleeve |
| | | 123. Pull cable |
| | | 124. Brake block/asbestos-free |
| | | 125. Split taper socket |
| | | 126. Clamping pin |
| | | 127. Air cylinder |
| | | 128. Packing |
| | | 129. Profile packing |
| | | 130. Nozzle |
| | | 131. Sealing ring |
| | | 132. Assembling auxiliaries |
| | | 133. Recording paper |
| | | 134. Recording pen |
| | | 135. Cartridge |
| | | 136. Cage |
| | | 137. Spring pin |
| | | 138. Damper |
| | | 139. Adaptor |
| | | 140. Valve |
| | | 141. Pressure transducer |
| | | 142. Pressure gauge |
| | | 143. Cut-off valve |
| | | 144. Safety valve |
| | | 145. Temperature switch |
| | | 146. Liquid indicator |
| | | 147. Prop. Servo valve |
| | | 148. Reducing valve |
| | | 149. Switch |
| | | 150. Thermom.transducer |
| | | 151. Chord wheel |
| | | 152. Fixing bolt |
| | | 153. Block |
| | | 154. Cheese head screw |
| | | 155. Flat spiral spring |
| | | 156. Steel chord |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-----------------------------|--|
| | | 157. Rope clamp |
| | | 158. Countersunk screw |
| | | 159. Potentiometer |
| | | 160. Cable pulley |
| | | 161. Shaft |
| | | 162. Dip stick |
| | | 163. Carrier complete |
| | | 164. Tension spring, stainless |
| | | 165. Angle joint |
| | | 166. Bracket |
| | | 167. End connection |
| | | 168. Cord guide for roller transmitter |
| | | 169. Incandescent lamp |
| | | 170. Halogen lamp |
| | | 171. Temperature sensor |
| | | 172. Solid state relay |
| | | 173. Potentiometer |
| | | 174. Proximity switch |
| | | 175. Digital indicator |
| | | 176. Carrier-reversible |
| | | 177. Plug |
| | | 178. Socket |
| | | 179. Magnet |
| | | 180. Power supply |
| | | 181. Display unit |
| | | 182. Milliammeter |
| | | 183. Voltmeter |
| | | 184. Relais |
| | | 185. Automatic cutout |
| | | 186. Safety relay |
| | | 187. Push button |
| | | 188. Led-module |
| | | 189. Switch head |
| | | 190. Flange for contact element |
| | | 191. Contact element |
| | | 192. Fluorescent lamp |
| | | 193. Fluorescent tube inverter |
| | | 194. Diode |
| | | 195. Luminous material |
| | | 196. Pr.circuit board complete |
| | | 197. Recorder pen |
| | | 198. Tachometer |
| | | 199. Limit switch |
| | | 200. Air hose |
| | | 201. Idling governor |
| | | 202. Idling control valve |
| | | 203. Pressure regulator |
| | | 204. Non return valve |
| H | Maintenance Part for Matisa | 1. Wiper with stirrup |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|----------------------------------|
| | | 2. Windscreen wiper |
| | | 3. Bellows |
| | | 4. Inductive proximity detector |
| | | 5. Incremental encoder |
| | | 6. Filter cartridge |
| | | 7. Primary air filter |
| | | 8. Secondary air filter |
| | | 9. Belt |
| | | 10. Belt set |
| | | 11. 3 belts set |
| | | 12. Fuel filter water separation |
| | | 13. Oil filter |
| | | 14. Fuel filter |
| | | 15. Relay |
| | | 16. Flat fuse |
| | | 17. Circuit breaker |
| | | 18. Filter |
| | | 19. Filter cartridge |
| | | 20. Cartridge |
| | | 21. Spacer |
| | | 22. Washer |
| | | 23. Ring |
| | | 24. Socket |
| | | 25. Roller |
| | | 26. Ring |
| | | 27. Bearing |
| | | 28. Thrust roller bearing |
| | | 29. Tatilping tool mktool |
| | | 30. Power-grip belt pulley |
| | | 31. Li'agneticplug |
| | | 32. Ventilation plug |
| | | 33. Hp pipe |
| | | 34. Screwed eush |
| | | 35. Connection |
| | | 36. Oil level glass |
| | | 37. Gasket |
| | | 38. O-ring |
| | | 39. Filter cartridge for hr82 |
| | | 40. Copper washer |
| | | 41. Power-grip belt |
| | | 42. Oil can shc 632 |
| | | 43. Pressure switch hu39 |
| | | 44. Preass, glass |
| | | 45. Feeler wheel/int, axle |
| | | 46. Touching wheel |
| | | 47. Feeler wheel/ext, axle |
| | | 48. Tightening nut |
| | | 49. Lock washer |
| | | 50. Input zeiss |
| | | 51. Lock |
| | | 52. Handle |

A.R.

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|----------|---------------------------------|
| | | 53. Key cylinder |
| | | 54. Screenwiper holder |
| | | 55. Door lock |
| | | 56. Silent-block |
| | | 57. Sintered brake shoe insert |
| | | 58. Split pin |
| | | 59. Key |
| | | 60. Valve |
| | | 61. Isolating valve ctrl on-off |
| | | 62. Drain valve |
| | | 63. Pneumatic valve |
| | | 64. Air control valve |
| | | 65. Pneumatic distributor |
| | | 66. Circuit selector pe98 |
| | | 67. Regulator |
| | | 68. Pressure switch |
| | | 69. Transmitter |
| | | 70. Remote flex cable |
| | | 71. Remote flexball cable |
| | | 72. Articulation of remote |
| | | 73. Power relay |
| | | 74. Replace 91-806-152-0000 |
| | | 75. Distr. Plug |
| | | 76. Manipulator |
| | | 77. Thermostat |
| | | 78. Rel.pb. |
| | | 79. Led |
| | | 80. Minimesse hose |
| | | 81. Thermostatic valve |
| | | 82. Air valve |
| | | 83. Pressure reducing valve |
| | | 84. N'sorie |
| | | 85. Press. Limitation valve |
| | | 86. Pressure reducing valve |
| | | 87. Cyl. Nut |
| | | 88. Roller axle |
| | | 89. Limit switch body 2or2 |
| | | 90. Head for limit switch |
| | | 91. Lever for limit switch |
| | | 92. Cylindr. Roller bearing |
| | | 93. Coupling |
| | | 94. Power-grip belt pulley |
| | | 95. Ub potentiometer |
| | | 96. Magnetic plug |
| | | 97. Roller bearing |
| | | 98. Simmer ba ui\,46 |
| | | 99. Bush |
| | | 100. Dessicatif cartridge |
| | | 101. Feeler wheel /int. Axle |
| | | 102. Touching wheel |
| | | 103. Feeler wheel /ext. Axle |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-----------------------------------|---|
| | | 104. Pneumatic cylinder 105. Conrod head 106. Connecting rod head 107. Inductive proximity detector |
| I | Jalan Rel Dan Jembatan Kereta Api | 1. Rail Plate And Bolt For Rail Joint Kawat las Elektroda Dan Thermit Untuk Sambungan Rel 2. Switch/Turn Out 3. Rail Fastening 4. Sleeper Bridges 5. Steel Bridges 6. Ballast Batu Pecah 2/6 Aspal Untuk Peron dan Perlintasan Racun Rumput 7. Slab Track 8. Waterproof System 9. Drainage System 10. Environmental Protection System 11. Testing 12. Connection System 13. Strengthening 14. Earth Quake Resistance Support 15. Grounding 16. Subgrade 17. Tunnel 18. Concrete Bridge 19. Composite Bridge 20. LRB/Seismic Bearing 21. Clamping Device 22. Girder 23. Concrete Pilnth 24. Hand Rail 25. Sistem Proteksi Petir 26. Flashbut Welding 27. Rel |
| J | Bangunan | 1. Stasiun 2. Depo 3. Balai Yasa 4. Tempat Perawatan /Workshop 5. TPSS 6. Operation Control Centre 7. Traction Power Substation Equipment Room (TPSS Equipment Room) |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------------|--|
| K | Fasilitas Stasiun Kereta Api | 1. Sistem Tayangan Jadwal KA |
| | | 2. Kamera CCTV & Jaringan Online |
| | | 3. Vending Machine & Automatic Gates System (Kartu Tiket KA) |
| | | 4. Automatic Locker Karcis/ Tiket Kereta Api Perangkat Audio/Video untuk Pelayanan dan Informasi |
| | | 5. Sistem Alarm (Alarm System) |
| | | 6. Sistem Keamanan (Security System) |
| | | 7. Peralatan Mobilisasi (lift, escalator, travelator, dan peralatan pendukungnya) |
| | | 8. Peralatan Back-Up Catu Daya |
| | | 9. Peralatan Penerangan Stasiun |
| L | Sistem Persinyalan Kereta Api: | 1. Signal Diesel Generator |
| | | 2. Power Cubicle |
| | | 3. Signal Power Cubicle |
| | | 4. Battery Charger |
| | | 5. Inverter |
| | | 6. Peralatan Telekomunikasi |
| | | 7. Panel (Lokal dan Pusat) |
| | | 8. Rack Modul |
| | | 9. Wayside Spare |
| | | 10. Vital Processor Interlocking (VPI) (Sistem Persinyalan VPI) |
| | | 11. Ansaldo (Sistem Persinyalan Ansaldo) |
| | | 12. Font Size Solid State |
| | | 13. WISTRACE (Sistem Persinyalan Westrace) |
| | | 14. Relay Interlocking System (MIS 801 & DRS 60) |
| | | 15. Generalogic 1 (GL-1) |
| | | 16. Sinyal Mekanik |
| | | 17. Train Operation Control Sistem |
| | | 18. Centralized Traffic Control |
| | | 19. Sistem Peringatan Dini |
| | | 20. Suku Cadang Peralatan di Workshop |
| | | 21. Saluran Fisik (saluran perkabelan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi) |
| | | 22. Sistem Proteksi dan Grounding |
| | | 23. Diagnostic Persinyalan dan Operasi |
| | | 24. Peralatan Perawatan Persinyalan |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|---|---|
| | | 25. Peralatan Platform Screen Door 26. Sistem Persinyalan Elektrik 27. Industrial Computer untuk Maintenance |
| M | Sistem Pelistrikan/ Sistem Instalasi Listrik | 1. Aliran Atas (OHC) 2. Gardu Listrik 3. OCS (Overhead Contact Line System) 4. Sistem Gardu Traksi 5. Sistem Distribusi Daya Listrik 6. Peralatan dan Sarana Perawatan Pelistrikan/ Instalasi Listrik 7. Suku Cadang peralatan di Workshop 8. Peralatan Pemantauan dan Pengendali Catu Daya Listrik 9. Aliran Bawah (Third Rail System) 10. Peralatan komunikasi Remote Control 11. Suku cadang komponen kendaraan khusus pemelihara LAA 12. Sistem proteksi peralatan LAA |
| N | Sistem Telekomunikasi Kereta Api | 1. Sistem Radio Microwave Digital/Analog Kereta Api 2. Sistem Antena Parabola 3. Sistem Catu Daya 4. Peralatan Digital/Analog Multipleks 5. Train Dispatching System (Sistem Pengaturan Perjalanan Kereta Api) 6. Remote Control Supervisory System 7. Sentral Telepon Otomat Kereta Api (Toka) 8. Jaringan Telex Kereta Api 9. Saluran Fisik 10. GSM-R System 11. Clock System 12. Suku Cadang Peralatan di Workshop 13. Jaringan IP telekomunikasi 14. Peralatan Perawatan Telekomunikasi 15. Sistem Proteksi dan Grounding 16. Tools/Measurement telekomunikasi |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | 17. Suku cadang pendukung traindispatching system 18. Saluran Fiber Optik 19. Suku cadang pendukung/interface saluran fiber optik 20. Suku cadang pendukung/saluran kabel tembaga |
| O | Suku Cadang Peralatan Di Balai Yasa | 1. Radio Link Equipment Spare Unit 2. Power Supply Equipment Spare Unit 3. Pcm Multiplex Spare Unit 4. Train Dispatching Spare Unit 5. Supervisory System Spare Unit 6. Test Equipment 7. System Spare Unit 8. Training Equipment Workshop Facilities 9. Digital Transmitter (TX) 10. Transmission Analyzer (RX) 11. Spectrum Analyzer 12. Channel Set 13. Radio Communication Tester 14. Microwave Repeater Checker 15. Microwave Frequency Counter 16. Portable Oscilloscope 17. Jiter Module 18. Rtu Input Module Test Box 19. Test Box 20. Tool Kit 21. V.S Tester 22. Atenuator Set 23. Bit Error Tate Set 24. Aemc Probe 25. Level Meter 26. Signal Generator 27. Fmp3 (Mobile Radio Set) 28. Power Meter 29. Audio Generator 30. Power Supply 31. Swr 32. Multimeter 33. Lcr Meter 34. Logic Probe & Pulser 35. Ic Tester |

4-1

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|--------------------------------------|---|
| | | 36. Mechanical Workshop Facilities 37. Peralatan Khusus Untuk Pengujian dan Pemeliharaan 38. Suku Cadang Peralatan di Workshop 39. Mesin CNC 40. Komponen mesin CNC 41. Mesin PCB Maker 42. Komponen PCB Maker 43. Mesin Kalibrasi 44. Komponen mesin kalibrasi 45. Alat brazing kabel 46. Komponen alat brazing kabel 47. Komponen traindispatching simulator |
| P | Peralatan di Tempat Perawatan Sarana | 1. Peralatan Angkat Komponen 2. Peralatan Angkat Sarana 3. Alat Bongkar Pasang Bearing Roda 4. Alat Bongkar Pasang Roda 5. Peralatan Bubut Roda 6. Load Bogie Test 7. Spring Test 8. Tool Kit 9. Alat Ukur Dimensi 10. Alat Pemeriksa Keretakan 11. Alat Pemeriksa Kelistrikan 12. Alat Ukur Diameter Roda 13. Alat Ukur Profil Roda 14. Alat Ukur Temperatur Bearing 15. Alat Ukur Berat Sarana 16. Alat Uji Kebocoran Sarana 17. Alat Ukur Ketinggian Peralatan Perangkai 18. Alat Uji Pengereman 19. Alat Ukur Tekanan Roda 20. Alat Ukur Waktu 21. Alat Ukur Temperatur Udara 22. Alat Kalibrasi 23. Battery Charger 24. Tool Diagnosa Test 25. Load Test/ Bench Test 26. Peralatan/ Pesawat Angkut 27. Sistem Udara Tekan 28. Instalasi Pencucian 29. Peralatan Mesin Perkakas 30. Instalasi Pengisian Bahan Bakar Atau Sumber Tenaga |

| NO. | KELOMPOK | NAMA BARANG |
|-----|-------------------------------------|--|
| | | 31. Pembangkit Listrik Cadangan 32. Peralatan Pengelasan 33. Alat Ukur Kekasara Permukaan 34. Vibrograf/Ride Index 35. Alat Ukur Jarak Keping Roda/Back to Back Gauge 36. Alat Ukur Kebisingan/Sound Level meter 37. Alat Ukur Keausan Knuckle 38. Peralatan Evakuasi 39. Turbocharger rotor balancing Mesin 40. Undercutting Machine 41. Test Bench Injection Pump 42. Cordless/Power tool 43. Governor Test 44. Mesin Bubut Roda 45. Mesin Press Roda 46. Mesin Oven 47. Alat Pemeriksaan Kekasaran Permukaan Benda 48. Automatic Load Bank |
| Q | Suku Cadang Peralatan Third Rail | 1. Conductor Rail 2. Fishplate 3. Expansion Joints 4. Ramps 5. Mid Points Anchor 6. Terminal Kabel/Power Feed 7. Insulator 8. Huckbolt® 9. Support bracket 10. Coverboard System/protective cover |
| R | Alat Kerja Khusus Third Rail System | 1. Rail End Drill Jig 2. Power Feed Rail Drill Jig 3. Mid-Point Anchor Rail Drill Jig 4. Expansion Joint Adjustment Tool 5. Power Feed Cutting Mask 6. Ramp Cover Cutting Jig 7. Rail Setting Gauge 8. Rail Track Gauge 9. Structure Gauge 10. Insulator Setting Jig |

| | | |
|---|---|---|
| S | Tanah untuk Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan berdasarkan rencana induk perkeretaapian | 1. Tanah untuk Jalan Rel |
| | | 2. Tanah untuk stasiun |
| | | 3. Tanah untuk depo |
| | | 4. Tanah untuk balai yasa |
| | | 5. Tanah untuk tempat perawatan/workshop |
| | | 6. Tanah untuk TPSS |
| | | 7. Tanah untuk signaling equipment room |
| | | 8. Tanah untuk telecommunication equipment room |
| | | 9. Tanah untuk operation control center |
| | | 10. Tanah untuk power equipment room |

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)
untuk Setiap Impor dan/atau Penyerahan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(4).../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5)

nama :

alamat :

NPWP :

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan* alat angkutan tertentu sebagai berikut: (7)

| No | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | | | | | |



Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (8)

nama :
alamat :
NPWP : (khusus impor, NPWP tidak perlu diisi)

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (9)

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, POLRI

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (10)

nama :
NPWP :
Nomor dokumen :

.....(11).....
Pemohon

.....(12).....
.....

Terlampir disampaikan: (13)

1.
2.dst.

A 1

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD UNTUK
SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD.
- (2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (5) Identitas pemohon SKTD.
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak perlu diisi.
- (6) Dipilih pada salah satu kotak.
- (7) Tabel rincian alat angkutan tertentu.
 - Kolom -1- : diisi dengan nomor urut.
 - Kolom -2- : diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor atau diperoleh.
 - Kolom -3- : diisi dengan jumlah unit alat angkutan tertentu.
 - Kolom -4- : diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan Harga Jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini.

Kolom -5- : diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal PPN menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPN yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : diisi dengan keterangan:

- kegunaan alat angkutan tertentu yang bersangkutan;
- kurs yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku;
- dalam hal impor, disebutkan juga Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor yang dilakukan; dan
- hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Contoh:

| No | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nilai Impor/ Harga-Jual*) (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) | Keterangan |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|---|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1. | Alat Angkutan Tertentu A | 1 Unit | 1.000.000 (USD 100) | 100.000 (USD 10) | - Kegunaan : Kantor Pelayanan - Bea dan Cukai : - Sesuai dengan: invoice No: Tanggal : B/L No: Tanggal : Kurs USD1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Tanggal : |
| Total | | | | | |

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, dapat dibuat dalam beberapa halaman

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon SKTD.

- (8) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

nama : EAN Corp.
alamat : Frankfurt, Germany
NPWP : -

- (9) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (10) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.
- (12) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.
- (13) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKTD

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut PPN (SKTD)
yang berlaku sampai dengan 31 Desember

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (4) ... /PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini kami: (5)

nama :

alamat :

NPWP :

Jenis Usaha :

yang merupakan: (6)

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

dengan izin usaha nomor : (7), atau perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, nomor : (8) dengan :

NPWP : (9)

Nama : (10)

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas: (11)

impor atau penyerahan alat angkutan tertentu sebagaimana terlampir; dan

pemanfaatan atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu.

untuk periode : (12)

.....(13).....

Pemohon

.....(14).....

.....

Terlampir disampaikan: (15)

1.

2.dst.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PERMOHONAN SKTD

- (1) Nomor, diisi sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon SKTD.
- (2) Lampiran, diisi dengan banyaknya lampiran permohonan SKTD.
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- (3) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon SKTD terdaftar.
- (4) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (5) Identitas pemohon SKTD.
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - jenis usaha : diisi berdasarkan jenis usahanya sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (6) Dipilih pada salah satu kotak.
- (7) Diisi dengan nomor izin usaha, penyelenggaraan, atau kegiatan.
- (8) Diisi dengan nomor dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, dalam hal impor pemohon SKTD merupakan pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.
- (9) Diisi dengan NPWP Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan.
- (10) Diisi dengan nama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang melakukan penunjukan.
- (11) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) pada kotak, sesuai dengan fasilitas PPN yang dikehendaki.
- (12) Diisi dengan tahun yang diajukan permohonan SKTD.
- (13) Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.
- (15) Diisi dengan lampiran sesuai persyaratan.

D. CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN PADA PERMOHONAN SKTD

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)
YANG DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN

(1)

Nama : ...
Alamat : ...
NPWP : ...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU

| Nomor | KPPBC/KPU dan Pelabuhan | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Kode HS | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Nilai Impor | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| ... (2) ... | ... (3) ... | ... (4) ... | ... (5) ... | ... (6) ... | ... (7) ... | ... (8) ... | ... (9) ... | ... (10) ... | ... (11) ... |
| TOTAL | | | | | | | | | |

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

| Nomor | Pengusaha Kena Pajak | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Harga Jual | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| .. (12) .. | ... (13) ... | ... (14) ... | ... (15) ... | ... (16) ... | ... (17) ... | ... (18) ... | ... (19) ... | ... (20) ... |
| TOTAL | | | | | | | | |

....., (21).....
Pemohon,

..... (22)
Jabatan
www.jdih.kemenkeu.go.id

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG DILAMPIRKAN
PADA PERMOHONAN SKTD

- (1) Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP
 - nama : diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
- (2) Diisi dengan nomor urut.
- (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor.
- (4) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (5) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (6) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu.
- (7) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (8) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.
- (9) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.
- (10) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (11) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (12) Diisi dengan nomor urut.
- (13) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (14) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (15) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (16) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (17) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.
- (18) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.
- (19) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (20) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (21) Diisi dengan tempat dan tanggal pengajuan RKIP.
- (22) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

E. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

I. CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK SATU KALI IMPOR ATAU PENYERAHAN
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

sesuai dengan surat permohonan nomor...(5)... tanggal...(6)..., merupakan: (7)

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

| No | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | | | | | |

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

nama :
alamat :
NPWP :

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10)

- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, TNI, atau POLRI
- Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

nama :
NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(12).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....(13).....

SKTD ini ditujukan kepada:(14)

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- lainnya.....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD:
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.

- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

- (5) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.
(6) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.
(7) Dipilih pada salah satu kotak.
(8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN.

Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah.

Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD

USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Penulisan pada kolom (4) menjadi:

Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah.

Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD

USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesar Rp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00 (USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *commercial invoice*, *Bill of Lading*, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Sehingga bentuk keseluruhan tabel menjadi sebagai berikut:

| No | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nilai Impor/ Harga-Jual* (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|--|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1. | Nama Alat Angkutan Tertentu | 1 Unit | 20.000.000 (USD 2.000) | 2.000.000 (USD200) | Sesuai dengan: invoice No: Tanggal : B/L No: Tanggal : Kurs USD1= Rp. 10.000,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Tanggal : |

1
R

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

- (9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

Contoh untuk impor alat angkutan tertentu.

nama : EAN Corp.
alamat : Frankfurt, Germany
NPWP : -

- (10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (9). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.

- (12) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Jakarta, 12 Oktober 2020.

- (13) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

- (14) Dipilih pada salah satu kotak.

Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam

h/k

hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a:

- a. dalam rangka impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.
- b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk pemohon SKTD;
 - 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu, melalui pemohon SKTD;
 - 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu terdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD; dan
 - 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.

F. CONTOH FORMAT SKTD DAN TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

I. CONTOH FORMAT SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

sesuai dengan surat permohonan nomor...(7)... tanggal...(8)..., merupakan: (9)

- Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
- Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

dan diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

- impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.
- penyerahan:
 - jasa persewaan kapal;
 - jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - jasa perawatan dan perbaikan kapal;
 - jasa perawatan dan perbaikan kereta api;
 - jasa persewaan pesawat udara; dan
 - jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.
- pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

.....(11).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor PelayananPajak



AK

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.
- (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.
- (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (7) Diisi dengan nomor surat permohonan SKTD.
- (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan SKTD.
- (9) Dipilih pada salah satu kotak.
- (10) Dipilih pada salah satu kotak, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan.
- (11) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.
Contoh: Jakarta, 4 September 2020.
- (12) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

II. TATA CARA PENATAUSAHAAN SKTD

Penerbitan SKTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf a dilampiri RKIP yang memuat daftar alat angkutan tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN, dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dalam hal penerbitan SKTD dilakukan secara manual, dengan peruntukan sebagai berikut:

- i. untuk pemohon SKTD;
- ii. untuk setiap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, melalui Kantor

- Pelayanan Pajak penerbit SKTD dan untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu melalui pemohon SKTD. Dalam hal impor berada di beberapa kantor dan/atau penyerahan diterima dari beberapa Pengusaha Kena Pajak, SKTD dapat difotokopi; dan
- iii. untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD sebagai arsip.

G. CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI LAMPIRAN SKTD

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP)

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)

Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

Nomor SKTD : ... (4) ... (diisi petugas KPP)

(5)

Nama : ...

Alamat : ...

NPWP : ...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU

| Nomor | KPPBC/KPU dan Pelabuhan | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Kode HS | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Nilai Impor | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- |
| ... (6) ... | ... (7) ... | ... (8) ... | ... (9) ... | ... (10) ... | ... (11) ... | ... (12) ... | ... (13) ... | ... (14) ... | ... (15) ... |
| TOTAL | | | | | | | | | |

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU

| Nomor | Pengusaha Kena Pajak | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Harga Jual | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| ... (16) | ... (17) ... | ... (18) ... | ... (19) ... | ... (20) ... | ... (21) ... | ... (22) ... | ... (23) ... | ... (24) ... |
| TOTAL | | | | | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP YANG MENJADI
LAMPIRAN SKTD

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP, dicantumkan pada setiap halaman.
- (2) Diisi dengan nomor RKIP sesuai tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal RKIP.
- (4) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang bersangkutan.
- (5) Diisi dengan identitas pemohon SKTD yang mengajukan RKIP
 - nama : diisi dengan nama pemohon.
 - alamat : diisi dengan alamat pemohon.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- (6) Diisi dengan nomor urutan.
- (7) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan pelabuhan tempat alat angkutan tertentu diimpor.
- (8) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (9) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (10) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu.
- (11) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (12) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor per satuan.
- (13) Diisi dengan perkiraan Nilai Impor total.
- (14) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (15) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika permohonan disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika permohonan bagian ini tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).
- (16) Diisi dengan nomor urutan.
- (17) Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (18) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (19) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

- (20) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu, yaitu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (21) Diisi dengan perkiraan Harga Jual per satuan.
- (22) Diisi dengan perkiraan Harga Jual total.
- (23) Diisi dengan perkiraan PPN.
- (24) Diberi keterangan "TDP" oleh Kantor Pelayanan Pajak jika disetujui, dan keterangan "Dipungut PPN" jika fasilitas tidak dipungut atas alat angkutan dimaksud tidak disetujui (diisi setelah Kantor Pelayanan Pajak meneliti permohonan SKTD yang dilampiri RKIP).

H. CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI

I. SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI
UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(3)../PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(4)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

yang merupakan: (5)

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;

dan sesuai dengan permohonan pemetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor(6)..... tanggal(7)..... / secara jabatan*) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan*) alat angkutan tertentu, sebagaimana berikut: (8)

| No | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp) | Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|--|------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | | | | | |

Alat angkutan tertentu tersebut diperoleh dari: (9)

nama :
alamat :
NPWP :

untuk dimiliki dan digunakan oleh: (10)

- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

dengan: (11)

nama :
NPWP :

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(12)... tanggal ...(13)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(14)...

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



.....(15).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(16).....

SKTD ini ditujukan kepada:(17)

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....;
- PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu.....;
- lainnya.....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (4) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.

- b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
- c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha. Untuk kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak perlu diisi.

- (5) Dipilih pada salah satu kotak.
- (6) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.
- (7) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satu

Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.

- (8) Tabel fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang atas impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN.

Kolom 3 : Diisi dengan satuan jumlah alat angkutan tertentu dalam hal terdapat satuan pengukuran, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.

Kolom 4 : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan Rupiah.

Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan Rupiah

yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD
USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

Penulisan pada kolom (4) menjadi:

Rp20.000.000,00 (USD2.000,00).

Kolom 5 : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan Rupiah.

Dalam hal transaksi dalam valuta asing, diisi dengan nilai PPN yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat SKTD diterbitkan dan dalam satuan mata uang asing tersebut.

Contoh:

Nilai Impor USD2.000,00

Kurs Menteri Keuangan pada saat diterbitkan SKTD
USD1 = Rp10.000,00

Nilai Impor menjadi sebesar Rp20.000.000,00

PPN terutang yang tidak dipungut sebesar
Rp2.000.000,00

Penulisan pada kolom (5) menjadi Rp2.000.000,00
(USD200,00).

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *commercial invoice*, *Bill of Lading*, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal rincian nama dan jenis alat angkutan tertentu tidak dapat ditampung dalam satu lembar, maka dapat dibuat dalam beberapa halaman lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKTD dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak.

(9) Asal alat angkutan tertentu diperoleh.

(10) Dibubuhi tanda pilih (tanda cek) di salah satu kotak, dan hanya diisi dalam hal yang mengajukan permohonan SKTD adalah pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Contoh: impor alat angkutan tertentu oleh PT TNS untuk dimiliki dan digunakan oleh PT KAI (Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum).

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

- (11) Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menggunakan alat angkutan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka (10). Khusus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, nama dan NPWP diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara.
- (12) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.
- (13) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.
- (14) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.
- (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SKTD Pengganti.
- (17) Dipilih pada kotak yang sesuai dan diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dalam hal Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu atau diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual dalam hal Wajib Pajak menerima penyerahan alat angkutan tertentu, dalam hal SKTD yang diterbitkan merupakan SKTD untuk satu kali impor/penyerahan.

II. SKTD PENGGANTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

SURAT KETERANGAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI
Nomor : KET- TDPPN-...(2)

SKTD berlaku sejak tanggal ...(3)... sampai dengan 31 Desember ...(4)...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:(6)

nama :.....
alamat :.....
NPWP :.....
jenis usaha :

yang merupakan: (7)

- Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional;
- Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;
- Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum;
- pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional;

Dan sesuai dengan permohonan pembetulan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor(8)..... tanggal(9)..... / secara jabatan*) diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas: (10)

- impor atau penyerahan alat angkutan tertentu, sebagaimana RKIP terlampir.
- penyerahan:
 - jasa persewaan kapal;
 - jasa kepelabuhanan, meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - jasa perawatan dan perbaikan kapal;
 - jasa perawatan dan perbaikan kereta api;
 - jasa persewaan pesawat udara; dan
 - jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.
- pemanfaatan jasa persewaan pesawat udara dari luar Daerah Pabean.

Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ...(11)... tanggal ...(12)... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Pengganti ini berlaku sejak tanggal ...(13)...

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



.....(14).....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

www.jdih.kemenkeu.go.id

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SKTD PENGGANTI UNTUK
SETIAP IMPOR ATAU PENYERAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Saat mulai berlakunya SKTD, diisi dengan tanggal penerbitan SKTD.
- (4) Diisi dengan tahun sesuai periode yang diajukan permohonan SKTD.
- (5) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. nama : Diisi dengan nama pemohon SKTD.
 - b. alamat : Diisi dengan alamat pemohon SKTD.
 - c. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon SKTD.
 - d. jenis usaha : Diisi berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha.
- (7) Dipilih pada salah satu kotak.
- (8) Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKTD.
- (9) Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian SKTD.

*) pilih salah satu

Dalam hal penggantian SKTD dilakukan secara jabatan, nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKTD tidak perlu diisi.
- (10) Dipilih pada kotak yang tersedia, sesuai dengan fasilitas tidak dipungut PPN yang disetujui untuk diberikan.
- (11) Diisi dengan nomor SKTD yang dilakukan penggantian.
- (12) Diisi dengan tanggal SKTD yang dilakukan penggantian.
- (13) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SKTD Pengganti, yaitu tanggal penerbitan SKTD yang diajukan permohonan penggantian.
- (14) Diisi dengan kota dan tanggal SKTD Pengganti diterbitkan.
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal diterbitkannya SKTD.

Contoh: Tuban, 4 September 2020.
- (16) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD, SKTD
PENGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SKTD/SKTD PENGANTI/
RKIP PERUBAHAN (2)

Nomor: KET-TLK-.....(3)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor (4) tanggal
..... (5), kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: (6)

Nama :

NPWP :

Alamat :

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)/SKTD
Pengganti/RKIP Perubahan karena: (7)

- permohonan tidak lengkap;
- Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKTD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
..(8)../PMK.03/2020;
- Barang Kena Pajak yang dimohonkan fasilitas tidak dipungut PPN
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
..(8)../PMK.03/2020;
- belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa
Pajak terakhir;
- mempunyai utang pajak;
- belum menyampaikan Laporan Realisasi Impor, Perolehan,
dan/atau Pemanfaatan yang sudah menjadi kewajibannya;
dan/atau
- lainnya,

Demikian untuk dimaklumi.



.....(9).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PENERBITAN SKTD, SKTD PENGGANTI, ATAU RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Disesuaikan dengan jenis permohonan yang diterbitkan surat penolakan.
- (3) Diisi dengan nomor surat penolakan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (6) Diisi dengan identitas pemohon SKTD.
 - a. Nama : Diisi dengan nama pemohon.
 - b. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon atau Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Alamat : Diisi dengan alamat pemohon.
- (7) Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- (8) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- (9) Diisi kota dan tanggal diterbitkannya surat penolakan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan.

J. CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

Halaman ..(1) ... dari ...

RENCANA KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN (RKIP) PERUBAHAN

Nomor : ... (2) ... (diisi petugas KPP)

Tanggal : ... (3) ... (diisi petugas KPP)

(4)

Nama : ...
 Alamat : ...
 NPWP : ...

RKIP Perubahan ke : ... (5)...

Nomor RKIP yang diubah : ... (6)...

Nomor SKTD : ... (7)...

1. RENCANA KEBUTUHAN IMPOR ALAT ANGKUTAN TERTENTU (8)

| Nomor | KPPBC/KPU dan Pelabuhan | | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | | Kuantitas | | Kode HS | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Nilai Impor | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|-------|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--|-----------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |

2. RENCANA KEBUTUHAN PEROLEHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU (9)

| Nomor | Pengusaha Kena Pajak | | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | | Kuantitas | | Spesifikasi Teknis (Kegunaan, Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas) | Perkiraan Harga Jual | | Perkiraan Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|-------|----------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|--|----------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | | Per Satuan | Total | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

....., (10).....

Pemohon,

www.jdih.kemenkeu.go.id

..... (11)

Jabatan

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT RKIP PERUBAHAN

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman RKIP Perubahan yang dicantumkan pada setiap halaman RKIP.
- (2) Diisi dengan nomor RKIP perubahan sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (3) Diisi dengan tanggal RKIP perubahan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (4) Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan RKIP perubahan.
- (5) Diisi dengan urutan RKIP perubahan. Contoh: Perubahan ke : 1 (satu).
- (6) Diisi dengan nomor RKIP yang dilakukan perubahan.
- (7) Diisi dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP yang dilakukan perubahan. Nomor SKTD yang melampirkan RKIP adalah sama dengan nomor SKTD yang melampirkan RKIP perubahan.
- (8) Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan.

Contoh: alat angkutan A semula direncanakan untuk diimpor sebanyak 100 unit. Karena adanya tambahan kebutuhan, alat angkutan A ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

| Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu | Kuantitas | |
|--|-----------|----------|
| | Semula | Menjadi |
| -4- | -5- | -6- |
| Alat angkutan A | 100 unit | 200 unit |

- (9) Tabel diisi sama dengan tabel pada RKIP dengan menambahkan perubahan pada alat angkutan tertentu yang diajukan. Contoh: atas alat angkutan A semula direncanakan untuk diterima penyerahan sebanyak 100 unit. Karena kebutuhan, alat angkutan A harus ditambah menjadi 200 unit. Maka tabel RKIP perubahan:

| Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu/Jasa Kena Pajak Tertentu | Kuantitas | |
|--|-----------|----------|
| | Semula | Menjadi |
| -4- | -5- | -6- |
| Alat angkutan A | 100 unit | 200 unit |

- (10) Diisi dengan kota dan tanggal pengajuan RKIP perubahan.
- (11) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon perubahan RKIP.

K. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN

Halaman ..(1) ... dari ...

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN/ATAU PEROLEHAN

Nama : ... (3)
Alamat : ...
NPWP : ...

Nomor SKTD: ... (2)

1. REALISASI IMPOR BKP

| Nomor | Nomor PIB | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Kode HS | Spesifikasi Teknis | Nilai Impor | | Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | Satuan | Total | | |
| ... (4) ... | ... (5) ... | ... (6) ... | ... (7) ... | ... (8) ... | ... (9) ... | ... (10) ... | ... (11) ... | ... (12) ... | ... (13) ... |
| TOTAL | | | | | | | | | |

2. REALISASI PEROLEHAN BKP

| Nomor | Pengusaha Kena Pajak | Nama/Jenis Alat Angkutan Tertentu | Kuantitas | Nomor Faktur Pajak | Spesifikasi Teknis | Harga Jual | | Pajak Pertambahan Nilai | Keterangan |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | Satuan | Total | | |
| ... (14) ... | ... (15) ... | ... (16) ... | ... (17) ... | ... (18) ... | ... (19) ... | ... (20) ... | ... (21) ... | ... (22) ... | ... (23) ... |
| TOTAL | | | | | | | | | |

....., (24).....

..... (25)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH LAPORAN REALISASI IMPOR
DAN/ATAU PEROLEHAN

- (1) Diisi dengan nomor halaman dari total jumlah halaman laporan dan dicantumkan pada setiap halaman.
- (2) Diisi dengan nomor SKTD yang dilaporkan realisasinya.
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menyampaikan laporan:
 - nama : diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang atas impor alat angkutan tertentu, yang telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (7) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (8) Diisi dengan kode *Harmonized System* (HS) alat angkutan tertentu yang diimpor.
- (9) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (10) Diisi dengan Nilai Impor per satuan, dalam mata uang Rupiah.
- (11) Diisi dengan Nilai Impor total, dalam mata uang Rupiah.
- (12) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.
- (13) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (14) Diisi dengan nomor urut.
- (15) Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu.
- (16) Diisi dengan nama atau jenis alat angkutan tertentu yang diterima penyerahannya.
- (17) Diisi dengan satuan jumlah, seperti 1 buah, 1 unit, atau 1 set.
- (18) Diisi dengan nomor Faktur Pajak atas penyerahan alat angkutan tertentu.
- (19) Diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu meliputi kegunaan, merek, tipe, ukuran, dan kapasitas.
- (20) Diisi dengan Harga Jual per satuan.
- (21) Diisi dengan Harga Jual total.
- (22) Diisi dengan PPN yang tidak dipungut.

41

- (23) Diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (24) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan realisasi impor dan/atau perolehan.
- (25) Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan.

L. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SKTD

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK....(1)

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
Nomor: KET-BTL-.....(2)

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Dipungut, atas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai nomor ... (3) ... tanggal...(4)..., yang diberikan kepada Wajib Pajak: (5)

nama :
NPWP :
alamat :

dibatalkan.

.....(6).....
a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor



.....(7).....

surat ini ditujukan kepada: (8)

- Pemilik SKTD;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Lainnya.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SKTD

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKTD.

- (2) Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan SKTD sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku.
- (3) Diisi dengan nomor SKTD yang dibatalkan.
- (4) Diisi dengan tanggal SKTD yang dibatalkan.
- (5) Diisi dengan identitas pemilik SKTD.
 - nama : diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik SKTD.
 - NPWP : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik SKTD.
 - alamat : diisi dengan alamat Wajib Pajak pemilik SKTD.
- (6) Diisi dengan kota dan tanggal surat keterangan pembatalan SKTD diterbitkan.
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak penerbit.
- (8) Dibubuhi tanda pilih pada kotak penerima surat keterangan pembatalan SKTD:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. pemilik SKTD; dan
 - c. lainnya, jika ada.

M. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

I. ATAS SKTD PENGGANTI DAN SKTD YANG DIBATALKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor SKTD Pengganti atau nomor Surat Pembatalan SKTD; dan
4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak dilakukannya impor atau penyerahan alat angkutan tertentu.

II. ATAS ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NAMUN DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN

Untuk pengisian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk:

1. Kode Akun Pajak diisi dengan Kode Akun Pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode Jenis Setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan SKTD nomor ... tanggal ..."; dan
4. Masa dan Tahun Pajak diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan alat angkutan tertentu.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



TITIN KRISNIATI
NIP. 19730115 199803 2 002